



# LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN INDIKATOR  
MAKRO SOSIAL EKONOMI TAHUN 2022  
KABUPATEN TABALONG

KERJASAMA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG

DAN

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

OKTOBER 2022

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul : Penyusunan Dokumen Indikator Makro Sosial Ekonomi Tahun 2022  
Kabupaten Tabalong**

- Perguruan Tinggi Pengusul : Universitas Lambung Mangkurat
- Ketua Tim Pelaksana
  - Nama Lengkap : Prof. Dr. Suratno, M.Pd
  - NIP/NIDN : 195702061981031001/ 0006025707
  - Jabatan fungsional : Guru Besar
  - Jurusan/ Fakultas : Pendidikan Ekonomi/ FKIP
  - Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
  - Bidang Keahlian : Pendidikan Ekonomi
- 3. Anggota Tim Pengusul : Jln. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin
  - Instansi :
    - Perguruan Tinggi : Dosen 10 orang
    - Staf Pemda/Bappeda : 2 orang
- 4. Lokasi Pelaksanaan :
  - Nama Wilayah : Kabupaten Tabalong
  - Kecamatan :
  - Provinsi : Kalimantan Selatan
- 5. Periode Waktu Pelaksanaa : 1 Tahun 2022
- 6. Biaya Total : 299. 919. 244 (Bappedalitbang Kab. Tabalong)

Mengetahui,  
Ketua LPPM ULM

Banjarmasin, 07 Oktober 2022  
Ketua Peneliti

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmiko, M.Si  
NIP. 19680507 199303 1 020

Prof. Dr. Suratno, M.Pd  
NIP. 195702061981031001

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur diucapkan ke hadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan akhir Penyusunan Dokumen Indikator Makro Sosial Ekonomi Tahun 2022 Kabupaten Tabalong. Kajian dan analisis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Tabalong dimaksudkan untuk menyediakan data dan analisis ekonomi secara makro dalam perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi yang telah dicapai selama kurun waktu 5 tahun sejak 2016 hingga 2021 dan melakukan prediksi capaian kemajuan perkembangan untuk 5 tahun ke depan dari tahun dasar 2022 hingga 2026, yang mencakup indikator-indikator yang menjadi sumber resultan dari terbentuknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong.

Kajian dan analisis ini dirancang digagas untuk dapat dilakukan kaji ulang dan reflektif secara mendalam, karena setiap topik kajian diusahakan dilengkapi perangkat kalkulator untuk formula perhitungannya, yang sudah barang tentu persyaratan kelengkapan dan validitas input data penunjangnya merupakan syarat mutlak untuk diperolehnya angka indeks hasil perhitungan yang sah dan layak sebagai acuan dalam mengaji dan menganalisis alternatif kebijakan yang relevan untuk percepatan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Tabalong.

Disadari, bahwa rancangan dan gagasan kajian dan analisis ini masih terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam, untuk itu sumbang saran dari pengguna sangat diharapkan.

Semoga isi laporan antara kajian dan analisis ini memenuhi harapan sesuai butir-butir kesepakatan yang telah dibuat.

Akhir kata, semoga bermanfaat.

Banjarmasin, Oktober 2022

Tim Peneliti

## RINGKASAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mengetahui kondisi indikator makro sosial-ekonomi yang telah dicapai selama kurun waktu 5 tahun sejak 2016 hingga 2021. 2). Mengembangkan perangkat kalkulator perhitungan indikator makro sosial-ekonomi yang dapat digunakan secara cepat dan mudah tetapi valid dan reliabel sesuai dengan ketersediaan dukungan data yang bersesuaian dengan dasar asumsi perhitungan indikatornya. 3). Melakukan analisis tingkat prioritas atau *Analytical Hierarchy Process (AHP)* sektor pemberi kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah di Kabupaten Tabalong. 4). Melakukan telaah kesesuaian hasil AHP dengan prioritas yang tersusun dalam RPJMD daerah untuk memastikan kesejajaran tentang penentuan program dan arah kebijakan yang relevan dengan prioritas pembangunan yang mendukung kemajuan perekonomian daerah Kabupaten Tabalong. 5). Melakukan prediksi capaian kemajuan perkembangan kondisi indikator makro sosial-ekonomi selama 5 tahun ke depan dari tahun dasar 2022 hingga 2026, yang mencakup indikator-indikator yang menjadi sumber resultan dari terbentuknya pertumbuhan dan perkembangan indikator makro sosial-ekonomi yang berdampak pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 6). Membuat rekomendasi pilihan strategi dan kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong untuk mencapai kinerja pembangunan terutama indikator makro sosial-ekonomi pembangunan daerah Kabupaten Tabalong. Teori yang digunakan dalam penelitian ini guna mendukung penelitian meliputi: Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan dan kesenjangan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Jenis metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan. Jenis dan sumber data meliputi; primer dan sekunder. primer yakni hasil wawancara dan diskusi yang bersumber dari dengan pemangku kebijakan untuk penyusunan kebijakan daerah Kabupaten Tabalong terkait indikator makro sosial ekonomi dan sekunder yang masuk dalam kategori Data panel (*pooling data*), yakni data gabungan antara data *time-series* dan *cross sectional* terkait indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Tabalong. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi untuk data sekunder dan Diskusi Kelompok Terpumpun untuk data primer sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Hasil penelitian menggambarkan dari analisis ekonomi wilayah Ada skenario yang dianalisis dalam kajian kebijakan ini, skenario pertama menggunakan data historis 5 tahun dari data awal tersedia periode (2010-2014), skenario kedua menggunakan data historis 5 tahun terakhir periode (2017-2021), skenario ketiga menggunakan data historis 5 tahun terakhir sebelum Pandemi C 19 periode (2015-2019). Inflasi bulanan di Kota Tanjung relatif memiliki pola yang sama dan berulang secara musiman, dengan trend yang positif. Pola inflasi tahun 2021 di Kota Tanjung cenderung tinggi di bulan Februari, Juni, dan, November. Namun kondisi di bulan April, Juli, Agustus, dan September terjadi deflasi. IPM pendidikan mempunyai skenario pencapaian target tahun 2022 dan 2023 diperlukan beberapa langkah

strategis yang fokus untuk mencapainya. Simulasi pencapaian target IPM dari komponen RLS dan HLS dapat diskenarioakan menjadi 4(empat) pilihan yakni skenario (1)jika indeks kesehatan (AHH) dan kesejahteraan (PP) konstan dengan sumberdaya dan dana diarahkan khusus untuk memacu RLS, dan sementara HLS konstan; skenario (2) jika hal yang sama (1) tetapi yang dipacu HLS, dan sementara RLS konstan; skenario (3) jika hal yang sama (1) tetapi yang dipacu RLS dan HLS dengan komposisi yang mampu menunjang capaian target IPM; dan skenario (4) jika semua komponen penentu IPM baik indeks kesehatan, kesejahteraan, maupun pendidikan secara proporsional berimbang sesuai determinan dari masing-masing. Sedangkan komponen kesejahteraan tidak ditetapkan secara eksplisit, ada 5 skenario yang ditawarkan dalam policy brief ini yang terkait dengan Pencapaian target IPM dari komponen Kesejahteraan. Skenario 1 semua komponen pembentuk IPM disamakan dengan target dalam RPJMD Perubahan, dan hasilnya Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPPk) lebih rendah dari yang sudah tercapai di tahun 2020 dan 2021, namun target pada komponen pendidikan cukup berat untuk direalisasi. Skenario 2 beban komponen PPPk sudah mulai terasa berat, ketika semua alokasi sumber daya dioptimalkan pada komponen PPPk sedangkan komponen lainnya tetap sama dengan capaian tahun 2021, maka kenaikan PPPk pada tahun 2022 harus sebesar Rp.1.250.000,-/tahun. Skenario 3 beban komponen PPPk saat komponen RLS disesuaikan dengan kondisi riil dan komponen lainnya tetap sama dengan capaian tahun 2021, maka kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar Rp. 1.220.000,-/tahun. Skenario 4 beban komponen PPPk saat komponen RLS dan HLS disesuaikan dengan kondisi riil dan komponen lainnya tetap sama dengan capaian tahun 2021, maka kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar Rp. 1.170.000,-/tahun. Skenario 5 alokasi sumber daya pada semua komponen PPPk, RLS, HLS, dan AHH, maka kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar Rp.850.000,-/tahun, hal ini menunjukkan bahwa dengan mengubah komposisi capaian indikator pembentuk IPM beban setiap OPD akan lebih ringan mengingat semua OPD bergerak secara bersama-sama untuk mewujudkan pencapaian IPM tersebut.

Kesenjangan dan kemiskinan peneliti menerapkan dua skenario realisasi target Tingkat kemiskinan. Skenario pertama, diprediksikan tingkat kemiskinan sesuai dengan target RPJMD maka tahun 2022 dengan tingkat kemiskinan 5,65%, jumlah penduduk miskin sebanyak 14.847 jiwa, tahun 2023 tingkat kemiskinan 5,60%, penduduk miskin menjadi 14.896 jiwa dan tahun 2024 tingkat kemiskinan 5,35%, penduduk miskin menjadi 14.413 jiwa. Skenario kedua, diprediksikan berdasarkan data historis 2011-2021 maka jumlah penduduk miskin tahun 2022 sebanyak 15.855 jiwa dengan tingkat kemiskinan 6,04%. tahun 2023 sebanyak 16.021 jiwa dengan tingkat kemiskinan 6,02%, dan tahun 2024 sebanyak 16.185 jiwa dengan tingkat kemiskinan 6,01%. Gini ratio tahun 2022 sebesar 0,303, tahun 2023 sebesar 0,301, 2024 sebesar 0,299. Simulasi kalkulator IPM yang disesuaikan dengan target RPJMD menunjukkan AHH yang lebih tinggi yang harus dicapai dibandingkan dengan data proyeksi/target RPJMD, atau menyesuaikan dengan target RPJMD tapi indeks Pendidikan dan indeks kesejahteraan harus meningkat pesat. Perlu upaya yang lebih

besar untuk meningkatkan AHH. Upaya untuk meningkatkan AHH adalah dengan memperhatikan fasilitas Kesehatan, SDM Kesehatan, program Kesehatan (program ibu dan anak, remaja, SPM, dan stunting), dan penganggaran untuk bidang Kesehatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong Berdasarkan basis data 2001-2021, proyeksi model linear aplikasi “Kalkulator Simulasi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang Kabupaten Tabalong 2022” menunjukkan tren perekonomian Kabupaten Tabalong akan melambat dan kemudian berkontraksi dalam satu dekade terakhir. Rerata Pertumbuhan Ekonomi dalam periode 2022-2045 sebesar 0,03% per tahun sedangkan berdasarkan kalkulasi Compound Annual Growth Rate (CAGR) mencapai 0,02%. Potensi terjadinya skenario ini harus diwaspadai dan dicegah. Bila terwujud, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) selama 25 tahun ke depan dari 2020 hanya bertambah sebesar Rp0,56 triliun sehingga di akhir periode proyeksi 2045 nilainya menjadi Rp15,04 triliun. Skenario ini dapat terjadi dengan asumsi Kabupaten Tabalong masih bergantung pada sektor primer dan tidak ada sektor sekunder dan tersier yang maju dan dominan. Dalam tingkat pengangguran terbuka Simulasi menghitung jumlah lapangan kerja baru untuk mencapai target TPT RPJMD Kabupaten Tabalong 3,00-4,00% diperlukan dengan menggunakan asumsi jumlah Angkatan Kerja hasil proyeksi model ETS dan Linear. Simulasi berdasarkan skenario proyeksi model ETS dengan target TPT paling optimis 3,00%, dibutuhkan penambahan lapangan kerja baru sebanyak 1.037 pada tahun 2022, 2.002 tahun 2023 dan 4.029 tahun 2024. Sedangkan jika menggunakan skenario proyeksi model Linear jumlah tambahan lapangan kerja baru yang diperlukan sekitar 2.083 pada tahun 2022 serta 1.676 untuk tahun 2023 dan 2024.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Penelitian	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab I Pendahuluan	1
<b>A.</b> Latar Belakang	1
<b>B.</b> Maksud	14
<b>C.</b> Tujuan	14
<b>D.</b> Manfaat	15
<b>E.</b> Lokasi Kegiatan	16
<b>F.</b> Lingkup Pekerjaan	16
<b>G.</b> Luaran	17
Bab II Landasan Teori	18
<b>A.</b> Pertumbuhan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	18
<b>B.</b> Inflasi dan Daya Beli	19
<b>C.</b> Pengangguran	20
<b>D.</b> Pengertian dan komponen indeks pembangunan Manusia	22
<b>E.</b> Kemiskinan dan Kesenjangan	24
<b>F.</b> Pertumbuhan Ekonomi	30
Bab III Metodologi	32
<b>A.</b> Kerangka Pemikiran	32
<b>B.</b> Jenis Penelitian	32
<b>C.</b> Jenis dan Sumber Data	33
<b>D.</b> Teknik Pengumpulan Data	34

<b>E. Teknik Analisis Data</b>	34
<b>F. Program Kerja</b>	35
<b>G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan</b>	36
<b>Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>	38
<b>A. Nama Aplikasi dan Gambar antar muka Tampilan</b>	38
<b>B. Fungsi Aplikasi Kalkulator</b>	41
<b>C. Pengembangan Manual Aplikasi</b>	44
<b>D. Demonstrasi Aplikasi Kalkulator di ULM Bersama Bappedalitbang</b>	49
<b>E. Policy Brief Indikator Makro Sosial Ekonomi</b>	52
<b>Bab V Penutup</b>	61
<b>Daftar Pustaka</b>	62



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 : Program Kerja	35
Tabel 3.2 : Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Dokumen	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Tren Pelemahan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabalong 2011-2021	1
Gambar 1.2 : Distribusi Sektor Utama PDRB ADHK Kabupaten Tabalong Tahun 2021	1
Gambar 1.3 : IPM Tabalong, Kalsel dan Indonesia Tahun 2016-2021	6
Gambar 1.4 : Perbandingan Capaian APK Jenjang SD, SLTP, dan SLTA Tabalong Tahun 2016-2021	7
Gambar 1.5 : Perbandingan Capaian APM Jenjang SD, SLTP, dan SLTA Tabalong Tahun 2016-2021	8
Gambar 1.6 : Perbandingan Capaian APS Jenjang SD, SLTP, dan SLTA Tabalong Tahun 2016-2021	9
Gambar 1.7 : Grafik HLS Tabalong, Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021	10
Gambar 1.8 : Grafik RLS Tabalong, Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021	10
Gambar 1.9 : Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Tabalong, Kalsel dan Indonesia Tahun 2016-2021	12
Gambar 1.10 : Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan	13
Gambar 4.1 : Simulasi Pertumbuhan Ekonomi	38
Gambar 4.2 : Simulasi PDRB	38
Gambar 4.3 : Simulasi Ekonomi Regional	39
Gambar 4.4 : Simulasi PPEJP	39
Gambar 4.5 : Simulasi Inflasi	40
Gambar 4.6 : Simulasi TPT	40
Gambar 4.7 : Simulasi Ketimpangan	41
Gambar 4.8 : Simulasi IPM	41

Gambar 4.9 : Simulasi AHP

41

# BAB I

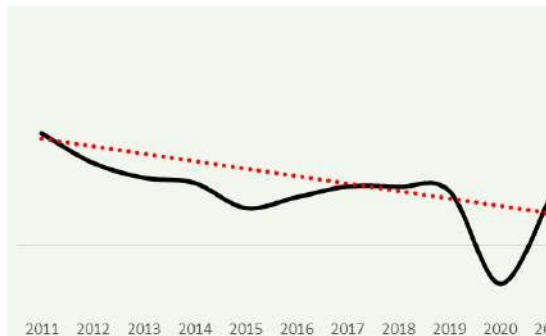
## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Selama lebih dari satu dekade terakhir perekonomian Kabupaten Tabalong masih didominasi Sektor Pertambangan dan Penggalian. Berdasarkan data BPS (2022), distribusi sektor ini mencapai 58,80% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2010 dan 48,82% di tahun 2021.

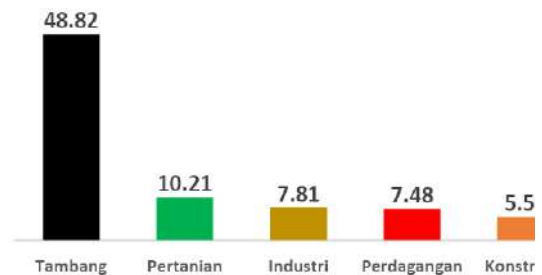
Penurunan peran Sektor Pertambangan dan Penggalian tersebut didorong oleh kejatuhan harga batubara di pasar dunia bukan karena berkembang pesatnya lapangan usaha lainnya. Hal ini ditunjukkan tren semakin rendahnya pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam periode 2011-2020. Dampaknya adalah semakin melemahnya (*slow down*) Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Tabalong.

**Grafik 1.1 : Tren Pelemahan  
Pertumbuhan PDRB Kabupaten  
Tabalong 2011-2021 (Persen)**



**Sumber: BPS Kabupaten Tabalong,  
diolah.**

**Grafik 1.2 : Distribusi Sektor Utama  
PDRB ADHK Kabupaten Tabalong  
Tahun 2021 (Persen)**



**Sumber: BPS Kabupaten Tabalong,  
diolah.**

Ketika Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian jatuh ke level 5,37 persen pada tahun 2012, Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabalong-pun melemah ke

tingkat 5,33 persen. Satu tahun sebelumnya (2011), pertumbuhan sektor ini sebesar 9,60 persen sehingga dapat mengangkat Pertumbuhan PDRB menjadi 7,23 persen. Kondisi terakhir di masa pemulihan ekonomi (*economic recovery*) pada 2021 sektor ini hanya dapat tumbuh sebesar 1,78 persen sehingga PDRB Kabupaten Tabalong bergerak di tingkat 3,28 persen.

Kondisi yang ada (*existing condition*) dari struktur perekonomian Kabupaten Tabalong tersebut perlu ditelaah secara lebih dalam dari berbagai sudut pandang alat analisis. Selain melihat tingkat pertumbuhan dan nilai Distribusi Lapangan Usaha PDRB, juga akan digunakan alat analisis *Location Quotient*, *shift share* dan Tipologi Klasen.

Data PDRB Menurut Pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga masih di bawah 25 persen ukuran ekonomi di mana Net Ekspor Impor memegang lebih dari 50 persen PDRB. Hal ini membuat perekonomian Kabupaten Tabalong rentan terhadap gejala pasar global khususnya pasar komoditas batubara. Adapun indeks harga komoditas dalam jangka panjang cenderung menurun dan inilah yang jadi sebab pelambatan ekonomi dalam satu dekade terakhir sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (Dunn Jr. dan Mutti, 2004; Jacks dkk., 2011).

Implikasi masih terbatasnya peran Konsumsi Rumah Tangga dalam perekonomian adalah rerata pendapatan masyarakat yang diukur dari PDRB Perkapita terlihat tinggi tetapi kemampuan daya belinya rendah. Misalnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Perkapita Kabupaten Tabalong tahun 2021 sebesar Rp75 juta sedangkan Kota Banjarmasin hanya Rp52 juta. Dengan menggunakan PDRB Konsumsi Rumah Tangga Perkapita tahun 2021, maka daya beli penduduk Kabupaten Tabalong perkapita hanya Rp21 juta sedangkan Kota Banjarmasin Rp32 juta.

Pada sudut pandang lain, pelemahan perekonomian Kabupaten Tabalong dapat dilihat dari tingkat inflasi yang rendah. Dalam periode 2016-2021, rerata inflasi

tahunan mencapai 2,30 persen. Bahkan pada masa pandemi Covid-19, tingkat inflasi Kota Tanjung sangat rendah yakni 1,65 persen pada 2020 dan 0,84 persen di 2021.

Inflasi yang rendah tidak selalu memiliki makna yang baik jika disebabkan oleh melemahnya permintaan masyarakat (*market demand*). Daya beli masyarakat yang melambat menyebabkan melemahnya pertumbuhan permintaan di pasar. Sesuai hukum pasar, maka tingkat harga cenderung tidak mengalami kenaikan dan memungkinkan terjadinya deflasi.

Dampak pelemahan ekonomi juga dapat dilihat dari melambatnya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dari tahun 2015 ke 2020 TPT Kabupaten Tabalong menurun sebesar 0,08 persen sedangkan tahun 2021 TPT bertambah 0,35 persen yaitu menjadi 3,43 persen.

Pelemahan ekonomi menyebabkan kurang berkembangnya pembukaan lapangan kerja baru sehingga laju penurunan TPT melambat. Dalam lima tahun terakhir, 2017-2021, rerata penambahan lapangan kerja baru sebanyak 1.198 per tahun sedangkan pada periode 2011-2015 rata-rata penambahan lapangan kerja baru sebesar 1.805.

Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan selalu menjadi tumpuan capaian dalam setiap program pembangunan. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, dan bukan sekedar sebagai alat pembangunan. Pada tahun 2015, sebanyak 195 negara sepakat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa mereka dapat mengubah dunia menjadi lebih baik dengan mengedepankan agenda “*Sustainable Development Goals (SDG) Tahun 2030*”. Proses ini akan dapat dicapai dengan cara menyatukan pemerintah, bisnis, media, lembaga pendidikan tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat di masing-masing negara untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030.

Agenda-agenda tersebut antara lain meliputi: (1) Menghilangkan Kemiskinan, (2) Hapus Kelaparan, (3) Membangun Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik, (4)

Berikan Pendidikan Berkualitas, (5) Terapkan Kesetaraan Gender, (6) Tingkatkan Air Bersih dan Sanitasi, (7) Tumbuhkan Energi yang Terjangkau dan Bersih, (8) Ciptakan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Tingkatkan Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (10) Kurangi Ketimpangan, (11) Memobilisasi Kota dan Komunitas Berkelanjutan, (12) Pengaruhi Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Atur Aksi Iklim, (14) Kembangkan Kehidupan di Bawah Air, (15) Memajukan Kehidupan Di Darat, (16) Menjamin Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat, dan (17) Bangun Kemitraan untuk mencapai tujuan (*NJ MED (New Jersey Minority Educational Development)*).

Visi pembangunan tersebut merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor, mulai dari politik, kebebasan ekonomi, dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Konsep pembangunan manusia berbeda dengan konsep pembangunan klasik. Konsep pembangunan klasik memberikan perhatian utama kepada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang dipandang dari sisi perdagangan, investasi, dan teknologi merupakan hal yang esensial dimana manusia dipandang hanya sebagai alat produksi untuk mencapai pertumbuhan dan bukan sebagai tujuan pembangunan. Sementara itu pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima manfaat dan bukan hanya sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi (sebagai alat, bukan tujuan akhir) dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor, mulai dari politik, kebebasan ekonomi, dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif

dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia. Dengan demikian, dalam konsep pembangunan manusia pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, akan tetapi menjadi alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu berperan sebagai proses perluasan pilihan masyarakat dalam pembangunan (BPS Kota Banjarmasin, 3) Sejalan dengan konsep pembangunan manusia, maka pembangunan seharusnya dikaji dan dianalisis dari sudut pandang manusianya, dan bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi saja.

Untuk menunjang kajian dan analisis tersebut maka diperlukan indikator makro sosial dan ekonomi yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara komprehensif yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam IPM pada dasarnya tercakup tiga komponen dasar untuk memenuhi kesejahteraan manusia yang dapat diukur secara operasional untuk menentukan dan merefleksikan tingkat capaian hasil dari usaha pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu.

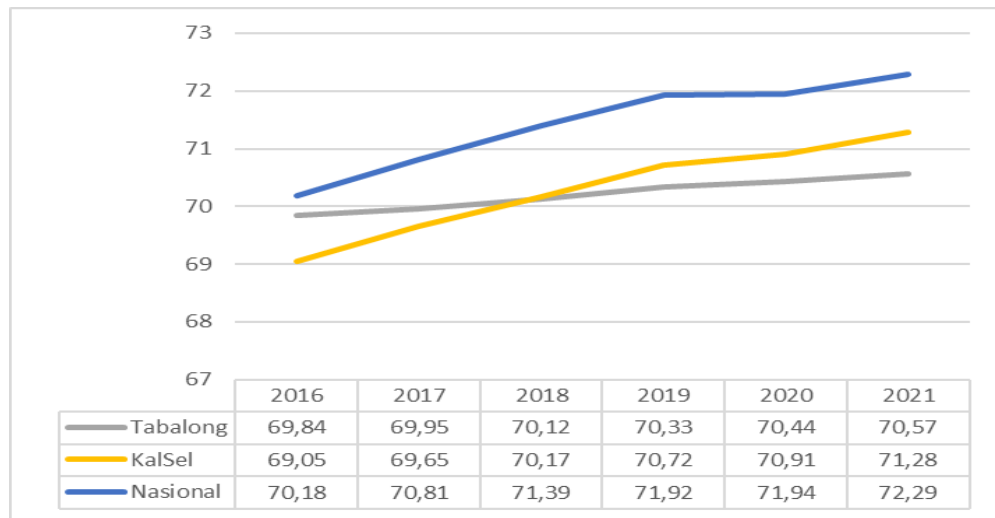
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: yakni (1) Umur panjang dan hidup sehat, (2) Pengetahuan, dan (3) Standar hidup layak (Badan Pusat Statistik).

Kegunaan IPM adalah sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), Penentu peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, dan secara nasional menjadi data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Tabalong pada tahun 2016-2017 lebih tinggi jika dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun demikian masih di bawah capaian nasional.



Perkembangan IPM kurang menggembirakan terutama di empat tahun terakhir 2018-2021 yang menunjukkan bahwa capaiannya meningkat namun kenaikannya relatif kecil jika dibandingkan dengan capaian provinsi sehingga gapnya menjadi semakin lebar dan bertambah lebar jika dibandingkan dengan capaian IPM nasional. IPM Tabalong sepanjang tahun 2016-2021 menunjukkan *trend* positif yang terus meningkat meskipun peningkatannya relatif kecil. Pandemi yang terjadi di tahun 2019 tidak berdampak signifikan terhadap IPM secara total di Kabupaten Tabalong, sebagaimana terlihat pada gambar 1 berikut:



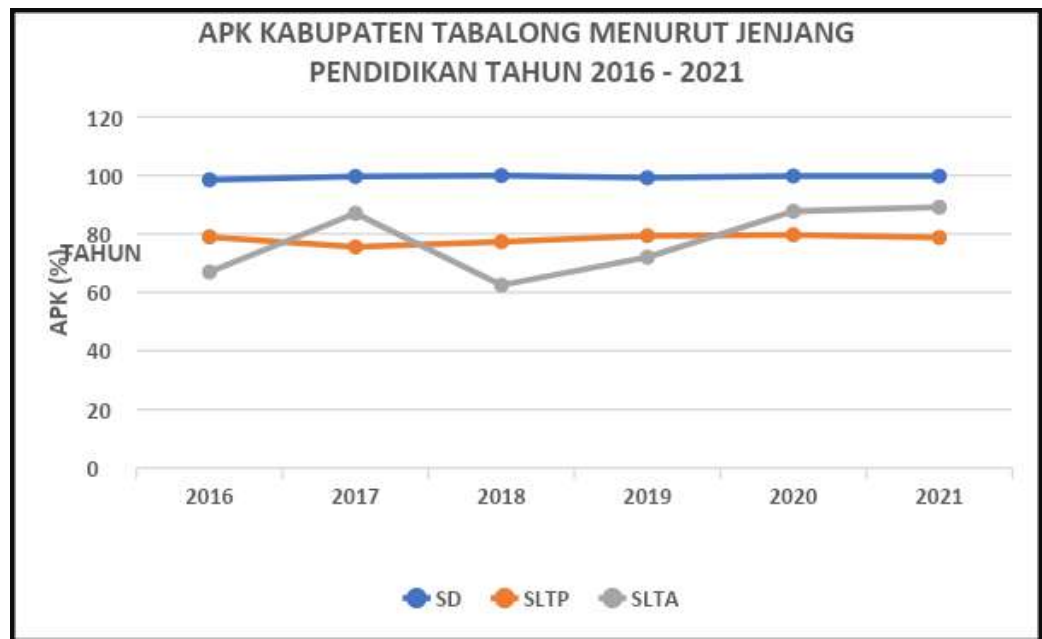
Sumber : BPS Jakarta

**Gambar 1.3 : IPM Tabalong, Kalsel, dan Indonesia Tahun 2016-2021**

Perkembangan berbagai indikator pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan, di Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dapat disimak pada sesi berikut.

- 1) Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut

diperhitungkan. Angka ini menunjukkan kinerja kemampuan daerah dalam memberikan layanan pendidikan pada masing-masing jenjang, baik jenjang SD sederajat, SLTP sederajat, dan SLTA sederajat. Gambaran perkembangan selama 5 tahun terakhir tahun 2016 -2021, capaian APK di Kabupaten Tabalong pada setiap jenjang pendidikan dapat diamati pada gambar berikut.

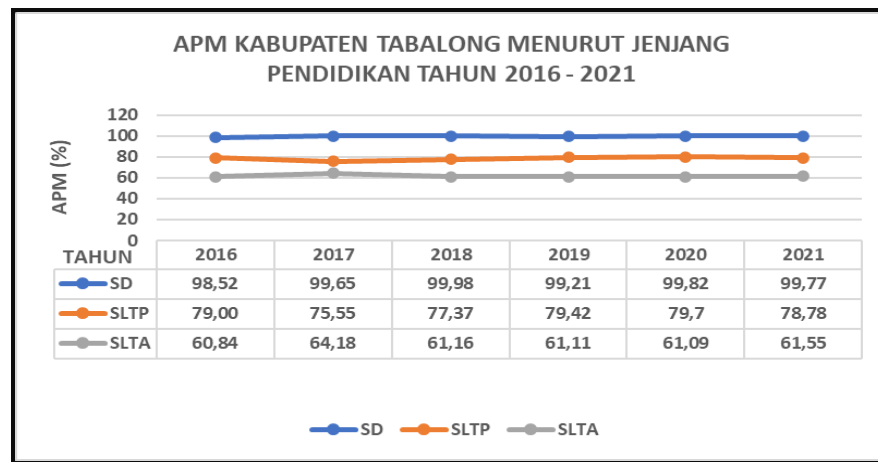


**Gambar 1.4 : Perbandingan Capaian APK Jenjang SD, SLTP, dan SLTA Tabalong Tahun 2016-2021**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabalong 2021

- 2) Indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan dalam menentukan besaran APM.

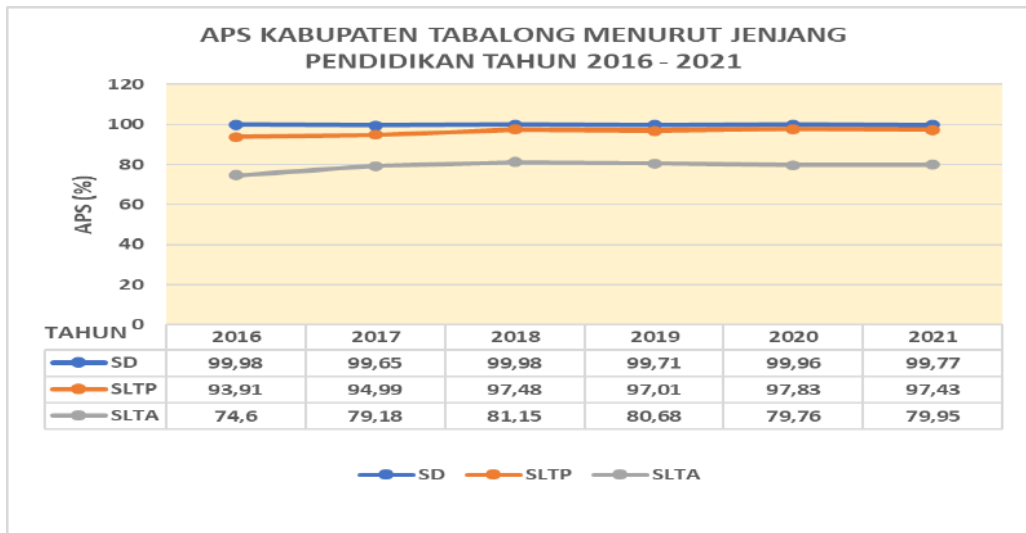
Gambaran perkembangan selama 5 tahun terakhir tahun 2016 -2021, capaian APM di Kabupaten Tabalong pada setiap jenjang pendidikan dapat diamati pada gambar berikut.



**Gambar 1.5 : Perbandingan Capaian APM Jenjang SD, SLTP, dan SLTA Kabupaten Tabalong Tahun 2016-2021**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabalong 2021

- 3) Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan dalam menentukan besaran APS. Gambaran perkembangan APS di Kabupaten Tabalong untuk setiap jenjang pendidikan selama 5 tahun yakni tahun 2016 – 2021 dapat diamati pada gambar grafik berikut.



**Gambar 1.6 : Perbandingan Capaian APS (%) Jenjang SD, SLTP, dan SLTA Tabalong Tahun 2016-2021**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabalong 2021

- 4) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tabalong dan Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dapat disimak pada gambar grafik berikut.



**Gambar 1.7 : Grafik HLS Tabalong, Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

- 5) Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tabalong dibandingkan dengan RLS provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 dapat di simak pada gambar grafik berikut.

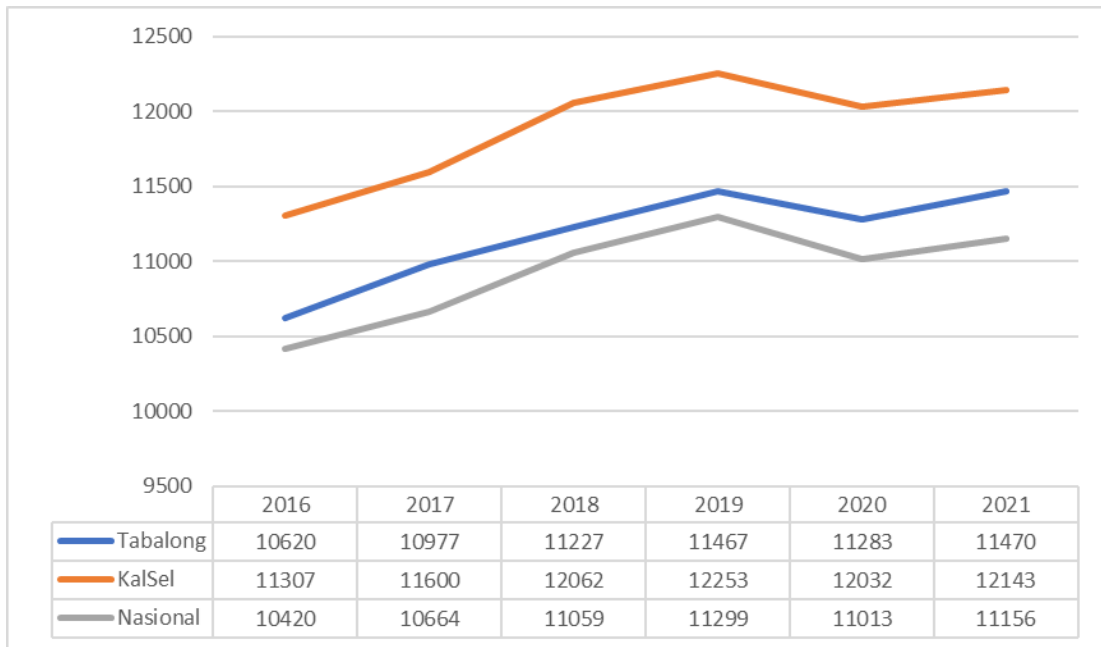


**Gambar 1.8 : Grafik RLS Tabalong, Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator kesehatan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Angka Harapan Hidup (AHH) untuk menilai derajat kesehatan penduduk. AHH digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk. AHH atau angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani bayi baru lahir. AHH dipengaruhi oleh angka kematian bayi (Sugiantari dan Budiantara, 2013; Maryani dan Kristiana, 2018).

Pengukuran standar hidup layak menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok dengan batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,- . batas minimumnya sampai tahun 1996 adalah Rp 300.000,- dan mulai tahun 1999, batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi di Indonesia.

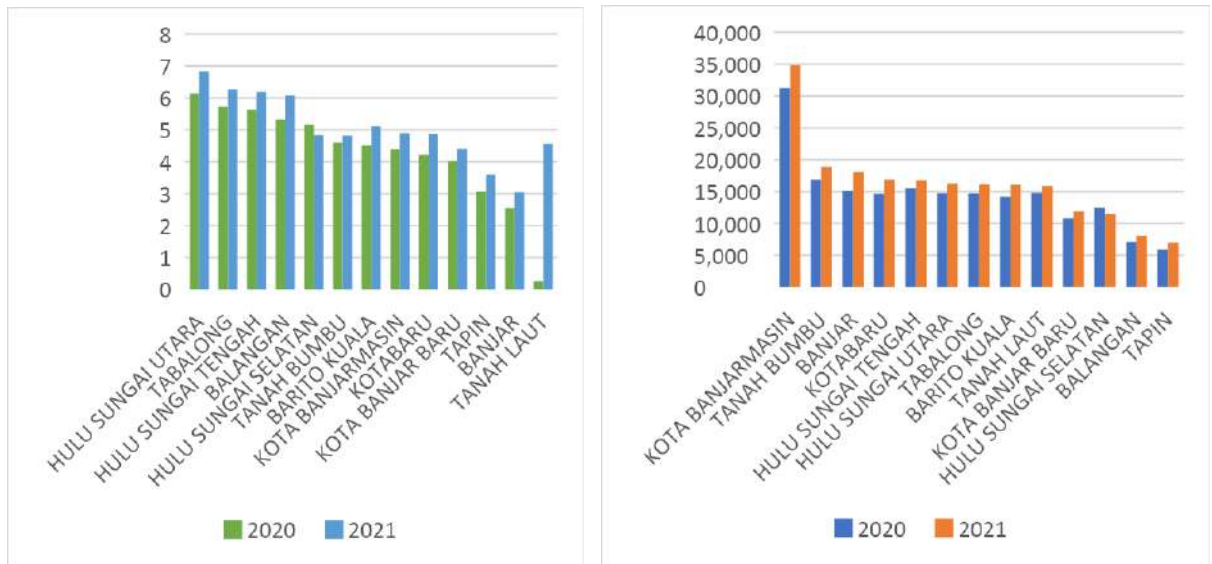


Sumber: BPS Jakarta

**Gambar 1.9 : Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Tabalong, Kalsel dan Indonesia Tahun 2016-2021**

Perkembangan indikator pengeluaran perkapita disesuaikan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional menunjukkan trend yang sama dimana, sejak tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang tinggi, namun karena mewabahnya virus C19, telah menggerus pertumbuhan tersebut sehingga pada tahun 2020 mengalami penurunan, karena pandemi telah mendisrupsi banyak hal termasuk cara orang bekerja seperti; pembatasan jam kerja, bekerja dari rumah hingga merumahkan karyawan/pegawai, menjadi pilihan sebagian besar sektor usaha, penerapan prokes, pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengurangi dan membatasi penyebaran virus berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sehingga otomatis juga mengurangi pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Seiring dengan pelaksanaan vaksinasi yang semakin luas dan penerapan prokes sebagai bagian dari kondisi new normal masyarakat, di tahun 2021 kondisinya membaik meskipun belum pada level pencapaian tertinggi sebelum pandemi.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 berada di urutan ke-24 secara nasional dan Kabupaten Tabalong tahun 2021 di urutan ke-7 dari 13 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 16.128 jiwa, secara presentasi kemiskinan di urutan ke-2 sebesar 6,27%. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan kondisi Tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 14.695 jiwa dengan presentasi kemiskinan 5,72%. Pandemi Covid 19 dan penurunan daya beli masyarakat berdampak terhadap peningkatan penduduk miskin di Kabupaten Tabalong.



**Gambar 1.10. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan**

Sumber: BPS Kalimantan Selatan

Kesenjangan di Kabupaten Tabalong tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2020, dimana tingkat ratio gini mengalami penurunan dari 0,346 menjadi 0,288. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan pendapatan di Kabupaten Tabalong lebih baik. Gini ratio merupakan ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna) karena koefisiennya dibawah 0,4 yang berarti bahwa terjadi



ketimpangan rendah di Kabupaten Tabalong, meskipun demikian Kabupaten Tabalong berada di urutan ke-2 setelah Kota Banjarbaru.

Kajian Indikator Makro Sosial Ekonomi berdasarkan kondisi yang ada sangat penting untuk mengukur capaian pembangunan dari aspek PDRB, inflasi, TPT, kemiskinan dan ketimpangan, serta IPM. Kajian tersebut akan membantu Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mengungkap kendala dan potensi pembangunan.

Berdasarkan kondisi yang ada akan dibuat proyeksi atas enam Indikator Makro Sosial Ekonomi tersebut dalam jangka lima tahun ke depan. Proyeksi diperlukan untuk menyusun rencana target Indikator Makro Sosial Ekonomi dalam jangka menengah.

## **B. Maksud**

Pekerjaan Penyusunan Dokumen Indikator Makro Sosial-Ekonomi Kabupaten Tabalong dimaksudkan untuk menyediakan data hasil kajian dan analisis indikator makro sosial-ekonomi Kabupaten Tabalong dalam perencanaan pembangunan.

## **C. Tujuan**

Penyusunan Dokumen Indikator Makro Sosial-Ekonomi Kabupaten Tabalong bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi indikator makro sosial-ekonomi yang telah dicapai selama kurun waktu 5 tahun sejak 2016 hingga 2021
2. Mengembangkan perangkat kalkulator perhitungan indikator makro sosial-ekonomi yang dapat digunakan secara cepat dan mudah tetapi valid dan reliabel sesuai dengan ketersediaan dukungan data yang bersesuaian dengan dasar asumsi perhitungan indikatornya.
3. Melakukan analisis tingkat prioritas atau *Analytical Hierarchy Process (AHP)* sektor pemberi kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah di Kabupaten Tabalong.

4. Melakukan telaah kesesuaian hasil AHP dengan prioritas yang tersusun dalam RPJMD daerah untuk memastikan kesejajaran tentang penentuan program dan arah kebijakan yang relevan dengan prioritas pembangunan yang mendukung kemajuan perekonomian daerah Kabupaten Tabalong.
5. Melakukan prediksi capaian kemajuan perkembangan kondisi indikator makro sosial-ekonomi selama 5 tahun ke depan dari tahun dasar 2022 hingga 2026, yang mencakup indikator-indikator yang menjadi sumber resultan dari terbentuknya pertumbuhan dan perkembangan indikator makro sosial-ekonomi yang berdampak pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
6. Membuat rekomendasi pilihan strategi dan kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong untuk mencapai kinerja pembangunan terutama indikator makro sosial-ekonomi pembangunan daerah Kabupaten Tabalong.

#### **D. Manfaat**

Kajian dan analisis ini diharapkan menghasilkan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong mengenai:

1. Tersedianya data antar waktu, antar sektor (*cross section*) tentang indikator makro sosial-ekonomi daerah Kabupaten Tabalong yang relevan dengan kondisi 5 tahun terakhir sejak sebelum pandemi hingga pasca pandemi.
2. Tersedianya perangkat kalkulator untuk prediksi indikator makro pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara komparatif, antara kondisi perkembangan termasuk diperhitungkan kontribusi sektor pertambangan dan kondisi perkembangan tanpa diperhitungkan kontribusi sektor pertambangan.
3. Diperolehnya hasil analisis informasi tentang tingkat prioritas atau *Analytical Hierarchy Process (AHP)* sektor pemberi kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah di Kabupaten Tabalong.
4. Diperolehnya hasil telaah kesesuaian hasil AHP dengan prioritas yang tersusun dalam RPJMD daerah sehingga diperoleh kepastian tentang penentuan program

dan arah kebijakan yang relevan dengan prioritas pembangunan yang mendukung perkembangan perekonomian daerah.

5. Didapatkannya rumusan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Tabalong yang meliputi semua sektor yang menjadi fokus pembangunan, anggaran pembangunan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dalam melaksanakan fokus pembangunan dalam meningkatkan kinerja indikator makro perekonomian daerah.

#### **E. Lokasi Kegiatan**

Lokasi pengerjaan penyusunan kajian dan analisis makro ekonomi berada di daerah Kabupaten Tabalong.

#### **F. Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan kajian dan analisis meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data antar waktu (*time series*) dan antar sektor (*cross section*) yang relevan terkait perekonomian daerah.
2. Menyusun prediksi indikator makro dalam bentuk kalkulator yang meliputi:
  - a. Output yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi (dengan dan tanpa pertambahan), Kontribusi Sektoral. **Location Quotient (LQ)**, **Shift-share**, Tipologi Klassen.
  - b. Inflasi yang terdiri dari: Inflasi dengan perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), Inflasi dengan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Deflater.
  - c. Kesempatan Kerja, terdiri dari: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
  - d. Ketimpangan Pendapatan dan Sektoral, terdiri dari: Indeks Gini, Indeks Ketimpangan Sektoral

- e. Kemiskinan, terdiri dari: Jumlah dan persentasi penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan.
- 3. Melakukan analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk melihat sektor prioritas pembangunan ekonomi daerah.
- 4. Mencocokkan hasil Analisis AHP dengan dokumen RPJMD untuk memastikan program dan arah kebijakan telah sesuai dengan prioritas pembangunan ekonomi daerah.
- 5. Memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

#### **G. Luaran**

Luaran yang ditargetkan dari Penyusunan Dokumen Indikator Makro Sosial-Ekonomi Kabupaten Tabalong ini mencakup:

1. Dokumen laporan berisi data perkembangan indikator makro sosial-ekonomi 5 tahun terakhir sebelum pandemi hingga pasca pandemi, dan prediksi 5 tahun ke depan sejak tahun 2022 hingga tahun 2026.
2. Perangkat Aplikasi Kalkulator Simulasi (PAKS) tentang indikator makro sosial-ekonomi yang relevan untuk perhitungan yang cepat dan mudah, tetapi valid dan reliabel sesuai dengan ketersediaan data dan asumsi yang dipakai.
3. Dokumen hasil AHP tentang kontribusi antar sektor pembangunan daerah dan prioritas kontribusinya yang relevan dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah.
4. Konfirmasi hasil AHP dengan dokumen RPJMD dan evaluasi kepastian relevansi penentuan program dan arah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong.
5. Rekomendasi kebijakan dan strategi yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dalam percepatan capaian perkembangan indikator makro sosial-ekonomi dalam pembangunan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Pertumbuhan Ekonomi adalah refleksi dari perubahan tingkat output ekonomi yang dihasilkan atau perubahan nilai total konsumsi akhir dalam satuan persen pada suatu negara dan daerah dalam suatu periode terhadap periode sebelumnya. Laju dan arah Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan bagaimana *Economic Performance* suatu wilayah (Porter, 2003).

Wilayah yang perekonomiannya bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan cenderung mengalami pertumbuhan yang lambat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Studi yang dilakukan Sun dan Wang (2021) di 30 daerah di China menunjukkan ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) justru berdampak negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Adapun kajian yang dilakukan Hayat dan Tahir (2021) terhadap Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Oman menemukan bahwa SDA memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan pengaruh negatifnya datang dari volatilitas harga komoditi tersebut di pasar global.

Dunn Jr. dan Mutti (2004) dan Jacks dkk. (2011) menekankan dalam jangka pendek harga-harga komoditi di pasar dunia berfluktuasi, sementara dalam jangka menengah dan panjang cenderung mengalami penurunan. Kejatuhan harga inilah yang kemudian membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara atau daerah yang bergantung pada ekspor berbasis SDA.

Fenomena wilayah yang kesulitan memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dari kekayaan SDA melimpah yang dimilikinya ini disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” atau natural *resource curse*. Menurut Frankel (2012), untuk memperbaiki kondisi tersebut diperlukan investasi pada peningkatan kapasitas modal manusia (*human capital*) dan institusi. Pendapat ini didukung oleh

hasil penelitian Amiri dkk. (2019) terhadap 28 negara yang kaya SDA bahwa institusi atau kelembagaan yang lebih berkualitas mendorong pemanfaatan SDA yang lebih baik bagi perekonomian dan mencegah *natural resource curse*. Studi yang dilakukan Zallé (2019) terhadap 29 negara di Afrika menunjukkan investasi pada modal manusia berdampak positif terhadap pemanfaatan SDA yang lebih baik.

## **B. Inflasi dan Daya Beli**

Inflasi menggambarkan terjadinya kenaikan harga-harga barang secara umum di dalam perekonomian. Dari sisi tinjauan moneter, inflasi terjadi akibat pertumbuhan Jumlah Uang Beredar (JUB) lebih tinggi dari tingkat output ekonomi yang dihasilkan. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi (Mankiw, 2005).

Inflasi dapat terjadi karena menurunnya suplai sehingga keberadaanya menjadi langka dalam perekonomian atau karena meningkatnya permintaan masyarakat, *ceteris paribus*. Inflasi juga dapat terjadi akibat tarikan permintaan masyarakat yang meningkat dan pada saat bersamaan suplai komoditinya berkurang (Mankiw, 2005).

Gangguan distribusi baik karena faktor alam maupun karena kecurangan seperti penimbunan dapat mempengaruhi suplai. Kenaikan harga bahan baku yang bergantung pada impor atau turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat juga dapat berdampak terhadap inflasi. Biasanya kelangkaan bahan pokok makanan atau naiknya harga energi seperti BBM dan listrik akan memicu inflasi yang tinggi (Bhat dkk., 2018; Taghizadeh-Hesary dkk., 2019).

Bulan Ramadhan dan hari raya menjadi salah satu momentum peningkatan permintaan masyarakat. Fenomena ini menyebabkan terjadinya inflasi musiman yang artinya tingkat harga akan kembali normal ketika momentumnya sudah dilalui (Saleh dkk., 2019).

Kenaikan inflasi dalam pandangan masyarakat awam menyebabkan mereka menjadi semakin miskin. Kemampuan daya beli uang yang mereka pegang menurun karena kenaikan harga-harga barang dan jasa. Menurut Teori Ekonomi Klasik, pada

dasarnya daya beli masyarakat dalam hal ini tenaga kerja sangat bergantung pada produktivitas marginalnya (Mankiw, 2005).

Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali memang berdampak buruk terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Studi yang dilakukan Adaramola dan Dada (2020) di Nigeria menemukan inflasi berdampak negatif terhadap laju Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Ghosh dan Phillips (1998) dan Segii (2009), inflasi yang tinggi menekan Pertumbuhan Ekonomi sedangkan inflasi yang moderat dan terkendali memiliki peran sebaliknya. Öner (2020) menekankan inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat sedangkan upah bersifat kaku.

Inflasi tidak selalu bermakna negatif jika kenaikan harga didorong oleh perekonomian yang sedang ekspansi. Sebagaimana dijelaskan oleh Mankiw (2005), ketika perekonomian membaik permintaan masyarakat meningkat, maka JUB akan bertambah. Pada kondisi tersebut inflasi akan terjadi dan mengalami peningkatan sementara lapangan kerja semakin bertambah sebagai penyesuaian kegiatan ekonomi sisi suplai karena membaiknya sisi permintaan. Hal terpenting dalam situasi tersebut adalah kebijakan untuk pengendalian inflasi pada batas moderat.

Sebaliknya inflasi yang rendah apalagi deflasi belum tentu memiliki makna positif. Inflasi rendah yang disebabkan oleh lemahnya permintaan sebagai akibat jatuhnya daya beli masyarakat atau lambatnya pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga bermakna buruk bagi perekonomian. Contohnya adalah banyak negara di masa pandemi Covid-19 yang mengalami inflasi rendah dan deflasi karena jatuhnya daya beli masyarakat (Armantier dkk., 2021).

### **C. Pengangguran**

Pengangguran Terbuka menurut BPS adalah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan baik sebelumnya belum bekerja sama sekali atau karena sebelumnya sudah bekerja tetapi berhenti. Adapun Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang meliputi penduduk yang bekerja dan menganggur.

Secara teknis, pengangguran terjadi sebagai akibat jumlah lapangan kerja yang tersedia kurang dari jumlah penduduk yang termasuk Angkatan Kerja. Pengangguran jenis ini disebut pengangguran alamiah (*natural unemployment*). Pengangguran juga dapat terjadi akibat seseorang belum menemukan pekerjaan sesuai dengan keahlian atau skill yang dimilikinya. Jadi pengangguran tidak mesti disebabkan tidak adanya lapangan kerja tetapi karena belum *matching*-nya jalur pendidikan yang dibangun dengan sektor lapangan kerja yang berkembang. Pengangguran ini disebut juga sebagai pengangguran friksional. Adapun pengangguran yang terjadi akibat Tingkat Upah Riil yang diminta tidak sama dengan yang ditawarkan disebut sebagai pengangguran struktural (Mankiw, 2005).

Pengangguran memiliki hubungan negatif dengan Pertumbuhan Ekonomi. Fenomena ini disebut sebagai Hukum Okun. Ketika perekonomian mengalami pelambatan (*slow down*) atau jatuh dalam resesi (*recession*) maka pengangguran akan meningkat. Naiknya tingkat pengangguran tersebut disebabkan menurunnya kegiatan produksi, perdagangan dan jasa sehingga jumlah lapangan kerja yang tersedia berkurang (Mankiw, 2005). Fenomena tersebut dibuktikan oleh studi yang dilakukan Alrahman dkk. (2022) di Indonesia dan Louail dan Benarous (2021) di Aljazair.

Pengangguran juga memiliki kaitan negatif dengan tingkat inflasi meskipun tidak selalu terjadi. Dalam jangka pendek (*short-run*) kebijakan makro ekonomi yang bertujuan mendorong penawaran agregat (*aggregate supply*) untuk membuka lapangan kerja lebih banyak di satu sisi akan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di sisi lain dapat mengangkat inflasi. Jika kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk menekan pamasan ekonomi akibat inflasi dengan menurunkan JUB sehingga permintaan agregat (*aggregate demand*) bergeser ke arah negatif, maka pengangguran dapat meningkat. *Trade-off* yang menggambarkan hubungan terbalik inflasi dengan pengangguran ini disebut Kurva Phillips (Mankiw, 2005).



#### **D. Pengertian dan Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan

seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report*, 1995:103), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

##### **1. Produktivitas**

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

## 2. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam Kajian produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup

## 3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

## 4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan

hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif.

#### **E. Kemiskinan dan Kesenjangan**

Karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah tingginya disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada Maret Tahun 2020, tercatat tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 7,38% (11,16 juta orang). Sementara di daerah pedesaan tercatat hampir dua kalinya yaitu sebesar 12,82% (15,26 juta jiwa), Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain, demografi, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan. Secara demografi rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin, dari aspek Pendidikan kepala rumah tangga miskin mempunyai rata-rata lama sekolah lebih rendah dibanding kepala rumah tangga tidak miskin. Sementara itu, dari aspek ketenagakerjaan sebagian besar kepala rumah tangga miskin bekerja pada sektor pertanian.

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Sumedi dan Supadi, 2004). Sedangkan menurut Chamsyah (2006) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi hidup

yang merujuk pada keadaan kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang dikatakan miskin, apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam segala bidang mereka selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya.

Dari definisi di atas diperoleh pengertian bahwa kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang tinggi dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, dalam hal memenuhi kebutuhan hidup seseorang harus mempunyai pekerjaan.

Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan juga seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Sementara itu, menurut BPS, kemiskinan adalah ketidak-mampuan penduduk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non-pangan. Maksud dari definisi tersebut adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan (GK) atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan.

Menurut Kuncoro (1997), semua ukuran kemiskinan mempertimbangkan norma tertentu sebagai dasarnya. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (consumption-based poverty line) terdiri dari dua elemen, yaitu : 1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan 2) jumlah kebutuhan yang lain yang sangat bervariasi atau bermacam-macam, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat

harga-harga makanan yang menjadi menu golongan miskin. Sedangkan yang kedua sifatnya lebih subyektif.

Menurut Kuncoro (2006), negara miskin menghadapi masalah klasik. Pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Isu mendasarnya adalah tidak hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan PDB atau PNB namun juga siapa yang membuat PDB atau pertumbuhan ekonomi tersebut tumbuh. Bila pertumbuhan terutama disumbangkan oleh segelintir orang (golongan kaya), maka merekalah yang paling mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut, sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin memburuk. Namun, bila pertumbuhan disumbang oleh banyak orang, maka buah dari pertumbuhan ekonomi akan dirasakan merata. Banyak Negara Sedang Berkembang (NSB) mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tetapi tidak membawa manfaat bagi penduduk miskinnya. Ini dialami oleh ratusan juta penduduk di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, dimana tingkat kehidupannya relatif berhenti dan bahkan anjlok bila dinilai riil.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (2004) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi;

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang sering kali terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang tidak menguntungkan mereka, seperti gender, diskriminasi atau eksploitasi ekonomi.

Pada dasarnya, definisi kemiskinan tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu (1) kemiskinan absolut, (2) kemiskinan relatif.

#### 1. Kemiskinan Absolut

Menurut konsep ini, kemiskinan dapat dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan fisik minimum (KFM) yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, dan papan yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

#### 2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif, menurut Miller dalam Kuncoro (2003) adalah orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum sehingga tidak selalu berarti miskin. Walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih lebih rendah dibandingkan keadaan masyarakat sekitarnya maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan yang bersangkutan.

Menurut konsep ini, garis kemiskinan akan berubah bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini berarti konsep kemiskinan bersifat dinamis sehingga kemiskinan akan selalu ada. Oleh karena itu, beberapa peneliti melihat kemiskinan dari berbagai aspek ketimpangan sosial.

Berikutnya akan dibahas tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan, jika kemiskinan dilihat dari sisi ekonomi menurut Sharp, 1996 dalam Kuncoro (2003), maka penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam dengan jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah menyebabkan produktivitasnya rendah. Yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya tingkat upahnya. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan atau karena keturunan.
3. Perbedaan dalam akses modal. Semakin susah akses individu terhadap modal maka akan semakin dekat dengan kemiskinan dan sebaliknya.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya pendapatan berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan ekonomi daerah. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan per kapita antar daerah (Kuncoro, 2004). Kuznets (1954) dalam Todaro, 2004 meneliti ketimpangan/kesenjangan di berbagai negara dengan data *Cross-Sectional* menemukan ada pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata – rata per kapita pada awal perkembangan negara masih rendah dan tingkat ketimpangannya juga rendah. Saat pendapatan rata – rata naik, maka kesenjangan juga akan meningkat. Saat pendapatan rata – rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali.

Myrdal (1957) meneliti tentang sistem kapitalis yang menekankan pada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah yang memberikan harapan tingkat keuntungan yang tinggi akan terus berkembang menjadi pusat – pusat kesejahteraan. Adanya

perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yaitu merugikan (*Backwash Effects*) mendominasi dengan pengaruh yang menguntungkan (*Spread Effects*) pada pertumbuhan daerah dan dapat mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Para pelaku ekonomi yang memiliki kekuatan di pasar secara normal maka pendapatannya akan cenderung meningkat, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyad, 2002), teori ini juga relevan jika di adopsi dalam kajian individual dimana, individu yang memiliki akses terhadap pasar, maka kecenderungannya akan mendapatkan pembagian porsi kue pembangunan yang lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki akses.

Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad, 2002, menyatakan bahwa faktor penyebab ketimpangan pendapatan di negara sedang berkembang adalah sebagai berikut; (1) pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan turunnya pendapatan per kapita, (2) inflasi dimana penerimaan pendapatan uang yang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang dan jasa, (3) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, (4) investasi yang banyak dalam proyek – proyek padat modal (*capital intensive*), sehingga presentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga membuat pengangguran bertambah juga rendahnya mobilitas sosial, (5) pelaksanaan kebijakan industri untuk impor menyebabkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis, (6) memburuknya nilai tukar bagi mata uang negara berkembang dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidakelastisan barang ekspor dari negara berkembang, (7) hancurnya industri – industri kerajinan rakyat.

Faktor – faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah menurut Sjafrizal (2008), adalah sebagai berikut; (1) perbedaan kandungan sumber daya alam, (2) perbedaan kondisi demografis, (3) kurang lancar mobilitas untuk barang dan jasa. (4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, (5) alokasi dana pembangunan antar wilayah. Kondisi yang disampaikan sebelumnya berkaitan dengan yang disampaikan



oleh Kuncoro (2004), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Penyebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugerah awal. Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda – beda sehingga menimbulkan jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 1985). Ketimpangan tidak dapat dihilangkan pada setiap kegiatan pembangunan daerah. Dengan adanya ketimpangan, akan memberi dorongan pada daerah yang terbelakang agar dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah lainnya. Selain itu daerah – daerah tersebut akan bersaing untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga dalam hal ini ketimpangan memberikan dampak yang positif. Meski begitu tetap ada dampak negatifnya, dengan semakin tinggi ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2006).

#### **F. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross aNational Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Dengan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan laju investasi di Negara. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi disuatu Negara maka akan merangsang investor untuk menanamkan saham dan memperluas industrinya yang akan menyedot tenaga pekerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi daerah ialah proses peningkatan jumlah produksi di suatu daerah yang terwujud dalam pertumbuhan pendapatan daerah dan diukur

melalui perbandingan produk domestik bruto. Melalui PDRB dapat dilakukan analisis pergeseran struktur ekonomi suatu wilayah, dan dapat mengidentifikasi sektor unggulan yang dimiliki suatu wilayah. Adapun dalam menganalisis keduanya diperlukan alat analisis yang berbeda. Analisis pergeseran struktur ekonomi dapat dilakukan melalui perhitungan nilai perubahan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB, sedangkan dalam indentifikasi sektor unggulan yang dimiliki suatu wilayah dapat menggunakan perhitungan *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan *Shift Share* klasik.

Pertumbuhan ekonomi diuraikan ke dalam point di bawah ini:

1. Pertumbuhan ekonomi menurut Sen dalam Badrudin (2017) adalah peningkatan jumlah produksi barang yang terlepas dari orang-orang yang memproduksi dan mengkonsumsi barang tersebut.
2. Menurut Putra (2018) Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang terjadi secara berkelanjutan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.
3. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah proses peningkatan jumlah produksi suatu daerah yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan pendapatan daerah yang diukur dengan cara membandingkan PDRB yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya.

Dalam pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan hal yang sangat penting untuk di analisis karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan memiliki implikasi kebijakan yang cukup luas serta berdampak terhadap pembangunan nasional.

Kemampuan suatu wilayah untuk tumbuh secara cepat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang saling berkaitan menurut Douglas C. North (1956) dalam Sjafrizal (2012) pertumbuhan ekonomi wilayah ditentukan oleh besarnya keuntungan kompetitif, wilayah yang bersangkutan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sehingga sektor tersebut dapat

dijadikan sebagai basis untuk kegiatan ekspor dan diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat memberikan *multiplier effect* bagi daerah yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **A. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meratakan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antar-wilayah di dalam region maupun antar-region, dan mengembangkan ekonomi secara sektoral maupun antar-lintas sektoral yang lebih menguntungkan didukung dengan strategi peningkatan sumber daya manusia.

Pada kegiatan ini, sebelum menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi, terlebih dahulu menetapkan indikator ekonomi makro yang akan di analisis dan dilakukan proyeksi. Indikator tersebut meliputi: pertumbuhan ekonomi; PDRB; jumlah penduduk; indeks gini; kemiskinan; pengangguran; ketenagakerjaan; inflasi; dan IPM. Indikator-indikator tersebut selanjutnya dilakukan analisis kinerja berdasarkan data historis, kemudian dilakukan proyeksi melalui pengolahan statistik. Dari hasil analisis tersebut dapat dirumuskan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tabalong.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang bertujuan untuk **menyusun formulasi kebijakan yakni** dengan menentukan kemungkinan kebijakan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah melalui proses forecasting (konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan ditentukan) terkait indikator makro sosial

ekonomi Kabupaten Tabalong. Dalam penelitian ini digunakan berbagai metode penelitian yang relevan yakni metode kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer yakni hasil wawancara dan diskusi yang bersumber dari dengan pemangku kebijakan untuk penyusunan kebijakan daerah Kabupaten Tabalong terkait indikator makro sosial ekonomi.
2. Data sekunder yang masuk dalam kategori Data panel (*pooling data*), yakni data gabungan antara data *time-series* dan *cross sectional* terkait indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Tabalong.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPS Kabupaten Tabalong, BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Bappeda Kabupaten Tabalong, BPS Indonesia, berbagai literatur, internet, dan instansi terkait lainnya.

Data yang dikumpulkan mencakup:

- (a) Data Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong menurut Jenis Kelamin
- (b) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
- (c) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
- (d) PDRB perkapita
- (e) Jumlah penduduk
- (f) Indeks gini
- (g) Garis kemiskinan
- (h) Jumlah penduduk miskin
- (i) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
- (j) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
- (k) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- (l) Penduduk setengah menganggur
- (m) Inflasi Kabupaten Tabalong
- (n) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- (o) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

- (p) Harapan Lama Sekolah (HLS)
- (q) Angka Harapan Hidup (AHH)
- (r) Pengeluaran Per Kapita (PPP)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yakni dengan mengambil data yang tersedia di website BPS baik berupa datasheet maupun publikasi laporan. Data juga dikumpulkan dari instansi terkait di Kabupaten Tabalong termasuk melalui *Focus Group Discussion*.

Data yang telah dikumpulkan (*collecting*) kemudian dibersihkan (*cleaning*). Data disusun (*arranging*) sesuai dengan jenis indikatornya dalam worksheet Microsoft Excel.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis dilakukan dalam dua cara, yaitu deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengolah data dalam bentuk tabel dan visualisasi grafik sehingga diperoleh pengetahuan (*insight*). Analisis ini terutama diterapkan untuk mengevaluasi kondisi yang ada (*existing condition*) di Kabupaten Tabalong berdasarkan Indikator Makro Sosial Ekonomi; Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Ketimpangan dan Indeks Pembangunan Manusia.

Analisis kuantitatif diterapkan untuk membuat proyeksi enam indikator tersebut dalam jangka waktu lima tahun ke depan, yaitu 2022-2026. Software yang digunakan untuk membuat proyeksi tersebut adalah Microsoft Excel sedangkan alat analisis utamanya meliputi *Exponential Tripple Smoothing* (ETS) dan *Linear Forecasting*.

Pertimbangan diterapkannya kedua alat analisis tersebut adalah keterbatasan jumlah observasi data yang tersedia dan ETS sangat *powerful* untuk mengatasinya. Disebut *Exponential Tripple Smoothing* karena alat prediksi ini menggunakan tiga

metode, yaitu komponen, tren dan musiman (*seasonality*) atau siklus. Metode ini disebut juga sebagai Holt-Winters Method (Makridakis et al., n.d.).

Adapun penggunaan Microsoft Excel karena software ini relatif familiar dan umumnya dimiliki oleh pimpinan dan staf Bappedalitbangda Kabupaten Tabalong. Tim Kajian akan membuat aplikasi Kalkulator Simulasi Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Tabalong berbasis Microsoft Excel dengan desain *user friendly*. Tujuannya agar pengguna mudah mengoperasikan dan memahami proyeksi yang dibuat dengan aplikasi tersebut.

Kualitatif, digunakan untuk menganalisis rumusan pilihan strategi dan kebijakan terkait **kondisi indikator makro sosialekonomi** di Kabupaten Tabalong.

## F. Program Kerja

Tabel 3.1 Program Kerja Kegiatan

No	Program Kerja	Hasil
1.	Pengumpulan data (collecting teknik dokumentasi)	Dokumen
2.	Pembersihan data (Data cleaning)	Data sheet
3.	Penyusunan dan kompilasi data	Data sheet
4.	Analisis kondisi yang ada sebagai alat evaluasi	Dokumen
5.	Membuat perangkat aplikasi kalkulator simulasi indikator makro sosial-ekonomi	Aplikasi berbasis Microsoft Excel
6.	Membuat proyeksi indicator makro sosial-ekonomi	Dokumen
7.	Melakukan analisis AHP dan melakukan pengkajian relevansi program dan arah kebijakan sesuai RPJMD	Dokumen kajian eksekutif
8.	Melakukan diskusi kelompok terpumpun (FGD)	Dokumen

9.	Melakukan inventarisasi dan pilihan kebijakan untuk rekomendasi	Laporan eksekutif
10.	Penyusunan Laporan Akhir	Laporan

### G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Bulan	Kegiatan	Tempat	Keterangan
April/ I	Menyusun Proposal Penelitian	Banjarmasin	Tim Peneliti
II	Menyusun Proposal Penelitian		
IV	Menyusun Proposal Penelitian, instrumen penelitian		
Mei/I-IV	Observasi Lapangan dan Eksposes awal	Tabalong	Tim peneliti
Juni/ I	Pengumpulan data	Tabalong / Banjarmasin	Tim peneliti
II	Pencarian data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi	-	Tim peneliti
III	Mengolah aplikasi kalkulator		Tim peneliti
IV	Mengolah aplikasi kalkulator	Tabalong / Banjarmasin	Tim peneliti
Juli/ I	Pencarian data meliputi wawancara dan dokumentasi	Tabalong / Banjarmasin	Tim peneliti



<b>II</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>	<b>Tabalong / Banjarmasin</b>	<b>Tim peneliti</b>
<b>III</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>	<b>-</b>	<b>Tim peneliti</b>
<b>IV</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>		<b>Tim peneliti</b>
<b>Agustus/ I</b>	<b>Eksposes antara dan Pelaporan Kalkulator</b>	<b>Tabalong / Banjarmasin</b>	<b>Tim peneliti</b>
<b>II</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>		<b>Tim peneliti</b>
<b>III</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>		<b>Tim peneliti</b>
<b>IV</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>		<b>Tim peneliti</b>
<b>September/ I</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>	<b>Tabalong / Banjarmasin</b>	<b>Tim peneliti</b>
<b>II</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>		<b>Tim peneliti</b>
<b>III</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>		<b>Tim peneliti</b>
<b>IV</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>		<b>Tim peneliti</b>
<b>Oktober/ I</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>	<b>Tabalong / Banjarmasin</b>	<b>Tim peneliti</b>
<b>II</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>		<b>Tim peneliti</b>
<b>III</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>		<b>Tim peneliti</b>

<b>IV</b>	<b>Mengolah data melalui instrumen penelitian</b>		<b>Tim peneliti</b>
<b>November/ I - IV</b>	<b>Eksposes akhir dan pengumpulan laporan akhir</b>	<b>Banjarmasin/ Tabalong</b>	<b>Tim peneliti</b>

#### **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Aplikasi Kalkulator Indikator Makro Sosial Ekonomi**

Sembilan aplikasi kalkulator Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Tabalong yang direncanakan pada kegiatan telah selesai dikembangkan dan dapat digunakan secara praktis. Setiap aplikasi kalkulator dilengkapi dengan manual teknis operasional dan video tutorial penggunaannya dalam file yang terpisah dari dokumen ini.

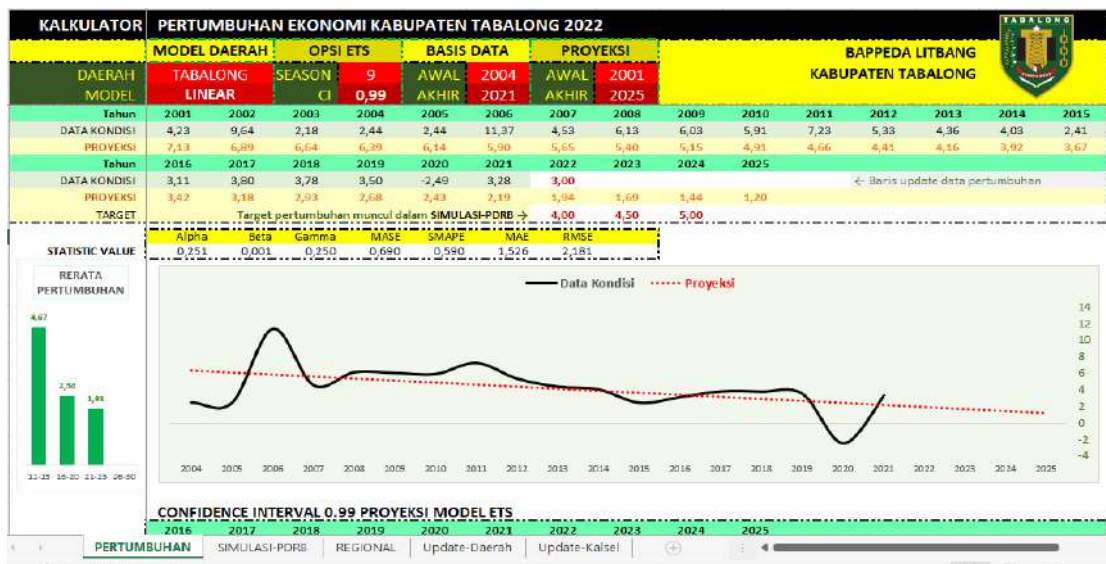
Secara garis besar pendekatan dan teknik analisis yang diterapkan pada sebagian besar aplikasi kalkulator tersebut menggunakan model *Exponential Triple Smoothing* atau ETS dan model Linear. Pada aplikasi tertentu, pendekatan yang digunakan adalah sesuai dengan rumus atau formula bawaan yang membentuk indikator makro tersebut seperti rumus Indeks Pembangunan Manusia, serta Analisis Shiftshare, Location Quotion dan Tipologi Klasen untuk Analisis Ekonomi Regional.

Sumber data Indikator Makro Sosial Ekonomi yang digunakan sebagai data kondisi (*existing condition*) dalam ke-9 aplikasi kalkulator tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik. Setiap aplikasi kalkulator juga dilengkapi fasilitas pembaharuan data (*updating data*) untuk periode 2022-2026 yang dapat diisi secara mandiri oleh pengguna. Pembaharuan data dapat dilakukan setelah BPS sudah merilis data terbaru.

Berikut ini adalah aplikasi kalkulator yang sudah selesai dikerjakan dan siap digunakan:

## 1. Kalkulator Simulasi Pertumbuhan Ekonomi

Aplikasi ini berfungsi untuk membuat simulasi proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong hingga tahun 2030. Hasil simulasi dapat digunakan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan dalam jangka menengah. Penetapan target Pertumbuhan Ekonomi pada Kalkulator ini akan menjadi dasar kalkulasi Kalkulator Simulasi PDRB.



**Gambar 4.1 : Simulasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi**

## 2. Kalkulator Simulasi PDRB

Aplikasi kalkulator Indikator Makro ini berfungsi untuk mendetilkkan target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong hingga pada level Pertumbuhan PDRB menurut jenis Lapangan Usaha dan Pertumbuhan PDRB menurut jenis Pengeluaran hingga tahun 2026.

Manfaat simulasi dari kalkulator ini adalah agar Pemerintah Daerah dapat memiliki gambaran arah kebijakan Pertumbuhan Ekonomi yang diturunkan secara sektoral. Tidak hanya gambaran tingkat pertumbuhan di level sektoral yang akan

diperoleh tetapi juga besaran jumlah PDRB dan nilai distribusi (*share*) secara sektoral sampai dengan tahun 2026.

Gambar 4.2 : Simulasi PDRB

### 3. Kalkulator Simulasi Analisis Ekonomi Regional

Kalkulator ini berfungsi untuk mengukur bagaimana Analisis Ekonomi Regional untuk Kabupaten Tabalong berdasarkan pendekatan Analisis Shiftshare, Location Quotient dan Tipologi Klasen. Dari kalkulator ini diharapkan dapat diperoleh pengetahuan sektor ekonomi apa saja yang dapat diunggulkan dan dikembangkan dan dikembangkan dan sektor yang tertinggal.

Analisis Ekonomi Regional pada kalkulator ini sifatnya adalah untuk mengevaluasi kondisi yang sudah terjadi (*existing condition*) bukan untuk membuat proyeksi. Periode analisis yang dapat diterapkan adalah PDRB Kabupaten Tabalong dari tahun 2010 hingga 2021.

Periode analisis dapat ditambah jika periode tahun ke depan sudah berjalan dan BPS telah merilis data PDRB terbaru. Pembaharuan data PDRB pada aplikasi kalkulator dapat dilakukan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

KALKULATOR	ANALISIS EKONOMI REGIONAL KABUPATEN TABALONG 2022										BAPPEDA LITBANG			
	KABUPATEN PERIODE ANALISIS	TABALONG					KLASIFIKASI PDRB		ADHK	KABUPATEN TABALONG				
		2014	2015	2016	2017	2018	SATUAN PDRB		Trilyun					
	PDRB TABALONG - TRILYUN RUPIAH					PDRB KALIMANTAN SELATAN - TRILYUN RUPIAH					ANALISIS SHIFT SHARE			
SEKTOR	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	14-15	15-16	16-17	17-18
Pertanian	1.28	1.30	1.35	1.41	1.49	15.64	16.01	16.60	17.28	17.99	0.020	0.040	0.045	0.053
Pertambangan	7.44	7.34	7.37	7.36	7.41	30.49	30.29	30.40	31.64	32.97	-0.013	0.003	-0.001	0.007
Industri	0.77	0.89	0.95	1.06	1.12	13.57	14.16	15.08	15.94	16.63	0.150	0.070	0.115	0.057
Listrik & Gas	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.10	0.13	0.13	0.14	0.15	0.502	0.043	0.004	0.075
Air	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.39	0.41	0.45	0.48	0.51	0.057	0.069	0.076	0.083
Konstruksi	0.53	0.58	0.63	0.70	0.75	7.68	8.16	8.59	9.09	9.62	0.094	0.090	0.109	0.079
Perdagangan	0.68	0.74	0.80	0.89	0.98	8.60	9.26	9.95	10.73	11.54	0.087	0.090	0.113	0.093
Transportasi	0.19	0.21	0.23	0.25	0.27	5.91	6.33	6.78	7.25	7.75	0.085	0.082	0.098	0.089
Akomodasi & Makan Minum	0.13	0.15	0.16	0.18	0.20	1.93	2.05	2.18	2.33	2.50	0.094	0.096	0.112	0.101
Infokom	0.40	0.44	0.48	0.53	0.59	3.52	3.81	4.15	4.47	4.78	0.092	0.090	0.104	0.110
Jasa Keuangan	0.17	0.17	0.20	0.21	0.23	3.36	3.52	3.79	4.02	4.19	0.051	0.122	0.095	0.090
Real Estate	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	2.30	2.43	2.59	2.72	2.86	0.076	0.081	0.091	0.062
Jasa Perusahaan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.58	0.61	0.66	0.71	0.77	0.067	0.072	0.078	0.070
Administrasi Pemerintahan	0.39	0.42	0.43	0.44	0.46	5.56	6.04	6.17	6.32	6.56	0.087	0.020	0.023	0.038
Jasa Pendidikan	0.34	0.36	0.38	0.41	0.44	4.30	4.59	4.91	5.23	5.60	0.061	0.061	0.071	0.069
Jasa Kesehatan	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	1.76	1.89	2.07	2.18	2.31	0.074	0.080	0.088	0.089
Jasa Lainnya	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	1.10	1.16	1.26	1.34	1.44	0.080	0.075	0.117	0.112
PDRB	12.62	12.93	13.33	13.83	14.35	106.78	110.86	115.74	121.86	128.09				

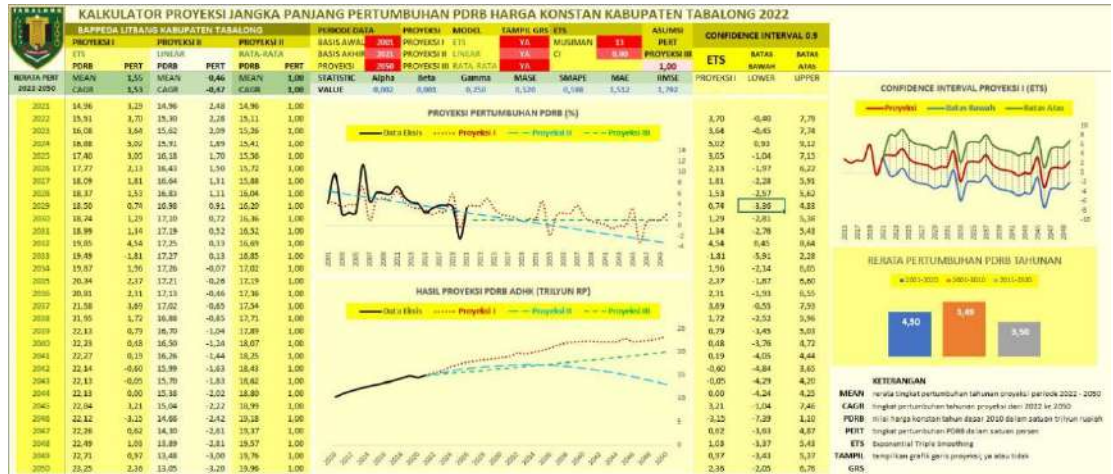
SEKTOR	ANALISIS LOCATION QUOTIENT PERIODE 14-18					ANALISIS TIPOLOGI KLASEN RERATA PDRB PERIODE 14-18				INDEKS WILLIAMSON			
						KALSEL		TABALONG		KALSEL			
	2014	2015	2016	2017	2018	GROWTH	SHARE	GROWTH	SHARE	KUADRAN	KETERANGAN	TAHUN	IW
Pertanian	0.69	0.70	0.71	0.72	0.74	3.48	14.32	3.95	10.19	III	Potensial berkembang	2010	0.49
Pertambangan	2.06	2.08	2.10	2.05	2.01	2.00	26.77	-0.10	55.16	II	Maju tapi tertekan	2011	0.50
Industri	0.48	0.54	0.55	0.59	0.60	5.21	12.91	9.77	7.12	III	Potensial berkembang	2012	0.49
Listrik & Gas	0.28	0.33	0.33	0.32	0.33	11.19	0.11	15.59	0.04	III	Potensial berkembang	2013	0.48
Air	0.59	0.60	0.60	0.61	0.63	6.99	0.38	7.13	0.23	III	Potensial berkembang	2014	0.46
Konstruksi	0.58	0.61	0.64	0.68	0.70	5.81	7.39	9.30	4.73	III	Potensial berkembang	2015	0.42
Perdagangan	0.67	0.68	0.70	0.74	0.76	7.62	8.56	9.63	6.08	III	Potensial berkembang	2016	0.40
Transportasi	0.28	0.29	0.29	0.30	0.31	6.99	5.82	8.95	1.72	III	Potensial berkembang	2017	0.40
Akomodasi & Makan Minum	0.59	0.62	0.64	0.68	0.70	6.72	1.88	10.09	1.21	III	Potensial berkembang	2018	0.39

Gambar 4.3 : Simulasi Analisis Ekonomi Regional

#### 4. Kalkulator Simulasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang (PPEJP)

Fungsi dan manfaat aplikasi kalkulator ini adalah untuk membuat simulasi proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong dalam jangka panjang. Durasi waktu proyeksi pada aplikasi kalkulator ini dapat diterapkan hingga tahun 2050. Hasil simulasi proyeksi dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan ekonomi dan pembangunan dalam jangka panjang khususnya RPJP.

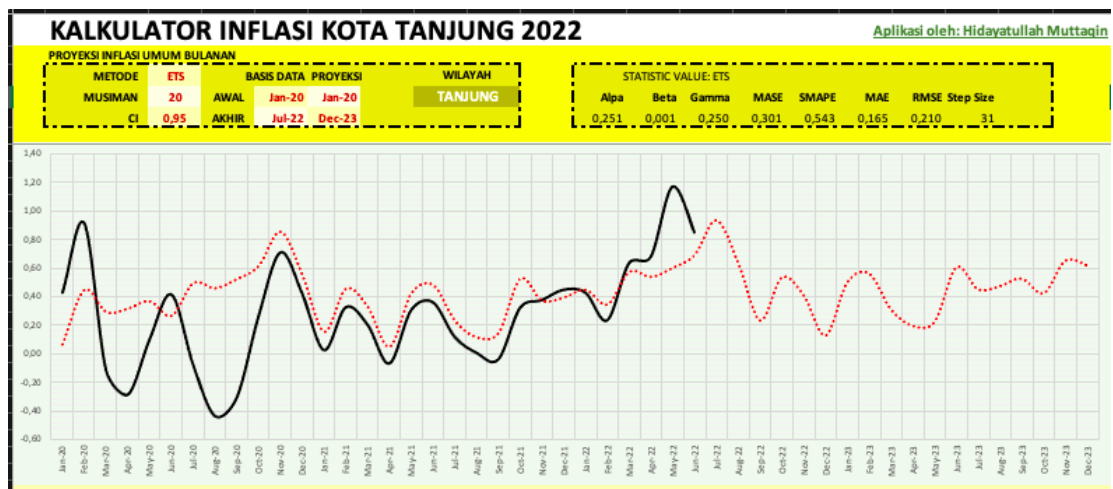
Hasil simulasi proyeksi selain berupa angka Pertumbuhan Ekonomi Tahunan sesuai periode proyeksi yang ditetapkan juga berupa nilai rupiah PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Pada aplikasi ini juga dapat dilakukan pembaharuan data kondisi (*existing condition*) tahun 2022-2026.



Gambar 4.4 : Simulasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

### 5. Kalkulator Simulasi Inflasi

Aplikasi Kalkulator Simulasi Inflasi Kabupaten Tabalong ini berfungsi untuk membuat proyeksi inflasi bulanan Kota Tanjung. Manfaat aplikasi kalkulator ini diharapkan dapat digunakan untuk mengantisipasi situasi inflasi bulanan pada jangka pendek, khususnya dalam waktu satu tahun ke depan. Pembaharuan data inflasi bulanan dapat dilakukan dari Juli 2022 hingga Desember 2026.



Gambar 4.5 : Simulasi Proyeksi Inflasi

## 6. Kalkulator Simulasi Tingkat Pengangguran Terbuka

Aplikasi Kalkulator Simulasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong ini berfungsi untuk membuat simulasi proyeksi TPT, jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Fungsi aplikasi kalkulator tersebut tidak hanya proyeksi TPT tetapi juga menghasilkan perhitungan berapa jumlah net lapangan kerja baru dalam setahun yang diperlukan untuk mencapai target penurunan angka TPT. Diharapkan dengan model simulasi proyeksi ini, Pemerintah Daerah dapat memiliki arah kebijakan penurunan TPT yang lebih terukur.

Proyeksi aplikasi kalkulator ini dapat diterapkan dari tahun 2022 hingga 2030. Sedangkan pembaharuan data dapat dilakukan pada periode 2022-2026.

INDIKATOR	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SATUAN
DATA KONDISI YANG ADA							TARGET PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA:					
TPT	3,15	3,00	3,05	3,10	3,07	3,07	3,50	2,50	3,10	3,00	2,90	Persen
TPAK	1418	1484	1503	1522	1529	1549	1524	1671	1649	1629	1620	Orang
Angkatan Kerja Baru	4.428	5.091	4.493	4.442	4	4.814	1.223	1.643	1.643	1.643	1.643	Orang
Net Lapangan Kerja B	5.481	5.290	5.390	5.320	300	5.420	5.025	2.374	359	1.734	1.730	Orang
Nali Tunas Pengangguran	-1.043	-322	-801	11	-293	875	328	-1.021	824	-91	-85	Orang
Berkahasiswa Kesempatan Ka	574	630	612	-441	-610	151						Orang
Angkatan Kerja - AK	126.440	131.800	136.370	129.304	129.908	129.908	139.255	138.800	140.541	142.104	143.302	Orang
Bekerja	102.418	105.067	102.157	103.697	103.097	101.963	102.401	105.405	106.914	107.919	108.156	Orang
Pengangguran Terbuka	3.998	5.123	4.215	4.207	5.291	4.665	4.804	5.412	4.257	4.286	4.371	Orang
Bukan Angkatan Kerja	42.993	44.332	42.922	43.019	51.647	51.647	33.952	31.524	30.090	30.000	32.210	Orang
Sekolah	15.644	14.875	14.351	15.820	16.565							Orang
Mengurus Rumah Tangga	26.005	27.250	28.447	28.645	28.555							Orang
Lainnya	3.344	2.207	2.124	2.552	2.527							Orang
Penduduk Usia Kerja	170.306	176.760	180.395	182.343	187.515	188.276	193.207	196.422	198.637	199.999	200.000	Orang

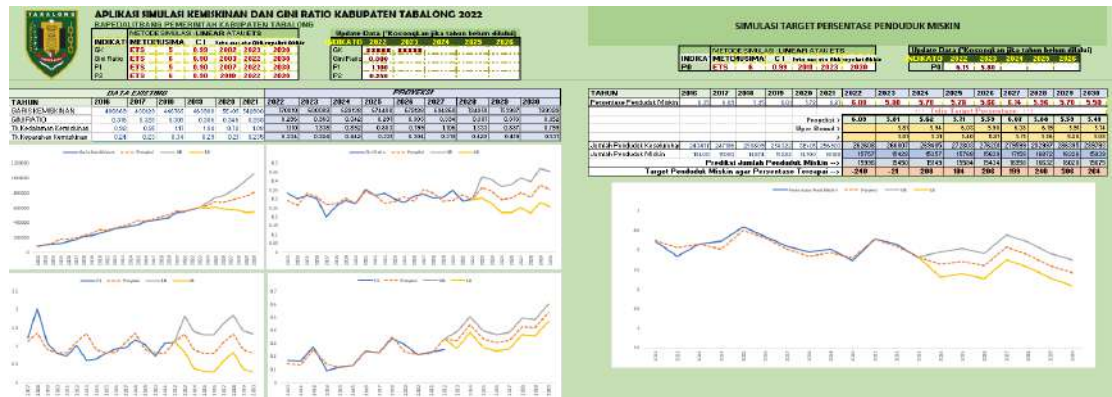
Gambar 4.6 : Simulasi Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

## 7. Kalkulator Simulasi Kemiskinan dan Ketimpangan

Aplikasi kalkulator ini berfungsi untuk melakukan simulasi proyeksi kemiskinan dan ketimpangan hingga tahun 2030 dengan fasilitas pembaharuan data pada 2022-2026. Simulasi proyeksi kemiskinan meliputi proyeksi untuk indikator Persentase Kemiskinan (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2), serta Garis Kemiskinan.

Sasaran utama simulasi proyeksi kemiskinan adalah untuk mendapatkan gambaran kondisi realistis ke depan dalam menurunkan Persentase Kemiskinan

serta berapa banyak jumlah penduduk miskin yang harus diangkat derajat ekonomi untuk mencapai target penurunan kemiskinan. Sedangkan simulasi proyeksi ketimpangan adalah untuk memperkirakan situasi ke depan indeks Gini.



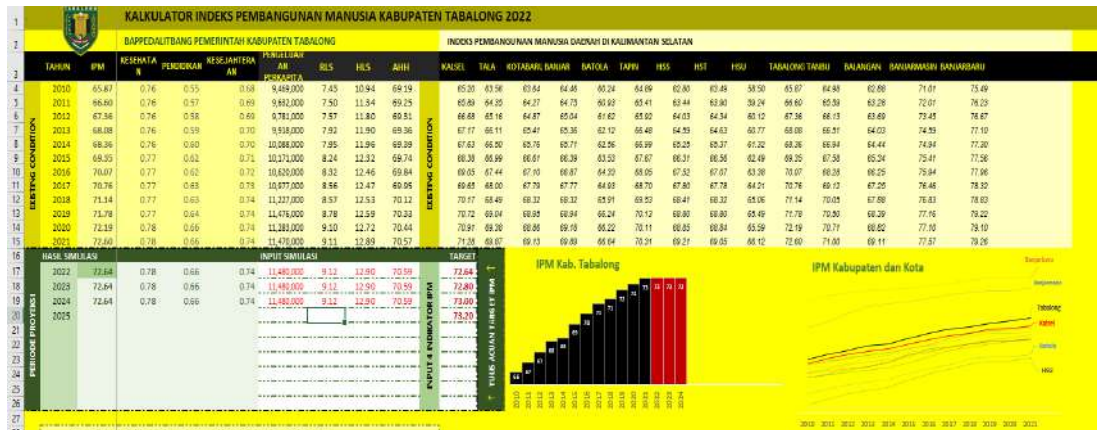
**Gambar 4.7 : Simulasi Proyeksi Kemiskinan dan Ketimpangan**

## 8. Kalkulator Simulasi Indeks Pembangunan Manusia

Aplikasi Kalkulator Simulasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong berfungsi untuk mensimulasikan berapa nilai kombinasi indikator pembentuk IPM untuk mencapai target RPJMD atau target IPM yang diinginkan. Dengan aplikasi kalkulator ini, kita dapat menetapkan target realistis pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk pembentuk Indeks Pendidikan, Angka Harapan Hidup (AHH) untuk pembentuk Indeks Kesehatan dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan untuk pembentuk Indeks Kesejahteraan.

Simulasi pada aplikasi ini dapat diterapkan untuk mencapai target IPM tahun 2022 hingga 2030. Diharapkan dengan aplikasi kalkulator ini, Pemerintah Daerah dapat mendetilkkan target IPM hingga ke level target 4 indikator pembentuknya, kemudian menurunkannya ke level program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

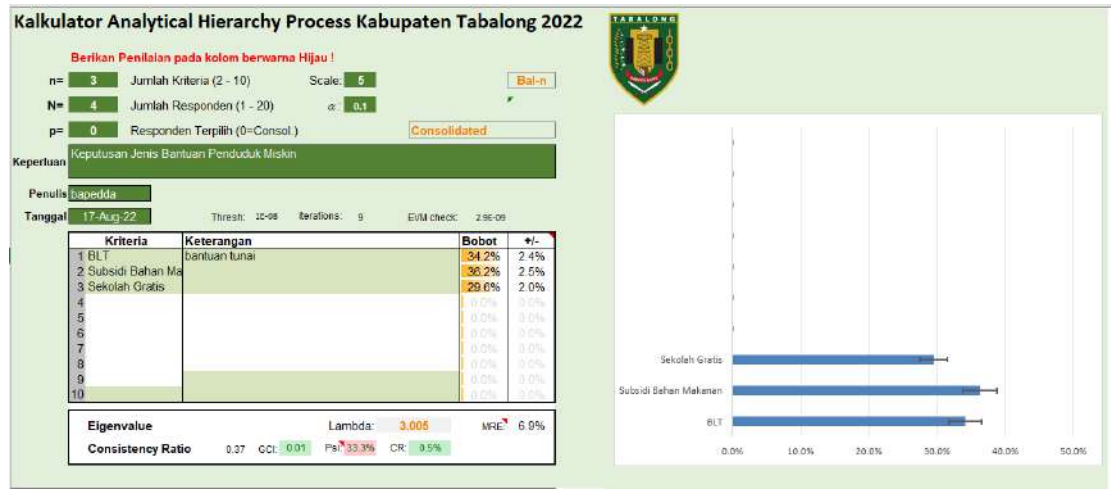




**Gambar 4.8 : Simulasi Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia**

## 9. Kalkulator Simulasi Analytical Heirarchy Process

Aplikasi Kalkulator Simulasi Analytical Heirarchy Process Kabupaten Tabalong adalah aplikasi yang memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pilihan beberapa program Pemerintah Daerah. Penjaringan aspirasi dan opini masyarakat melalui survei atau FGD dengan menggunakan aplikasi kalkulator ini berguna bagi Pemerintah Daerah untuk meranking prioritas program yang dibutuhkan masyarakat. Aplikasi simulasi AHP ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pendapat para ahli atau pandangan SDM internal mengenai prioritas suatu program dan kebijakan.



**Gambar 4.9: Simulasi Analytical Hierarchy Process**

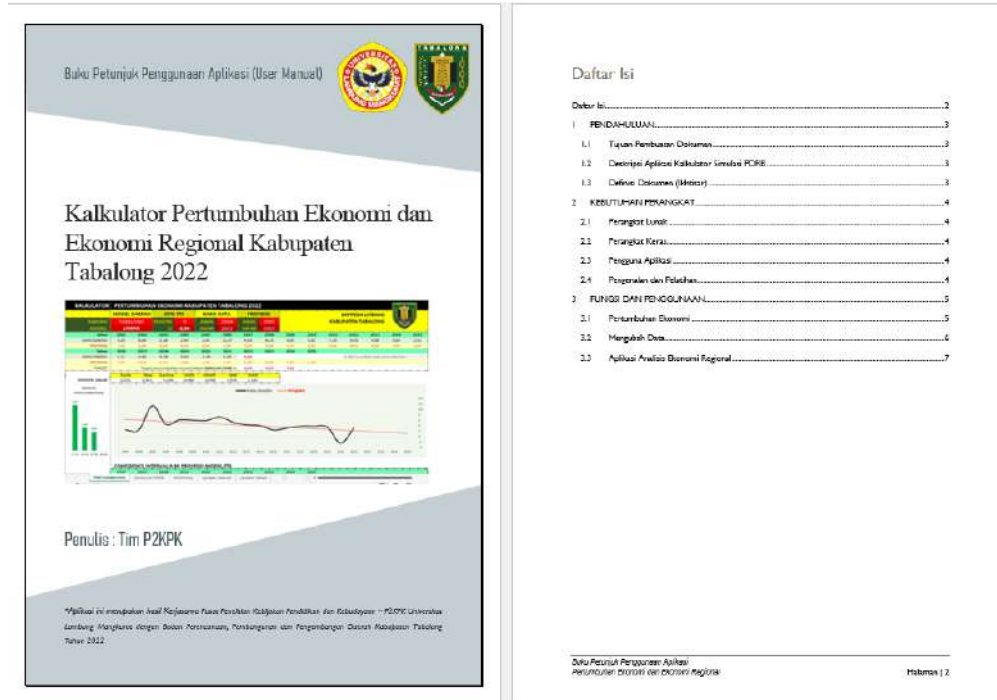
## B. Pengembangan Manual Aplikasi

Pengembangan aplikasi kalkulator juga dilengkapi dengan buku manual (buku petunjuk penggunaan) dan video tutorial penggunaannya. Manual dan video tutorial tersebut meliputi aplikasi :

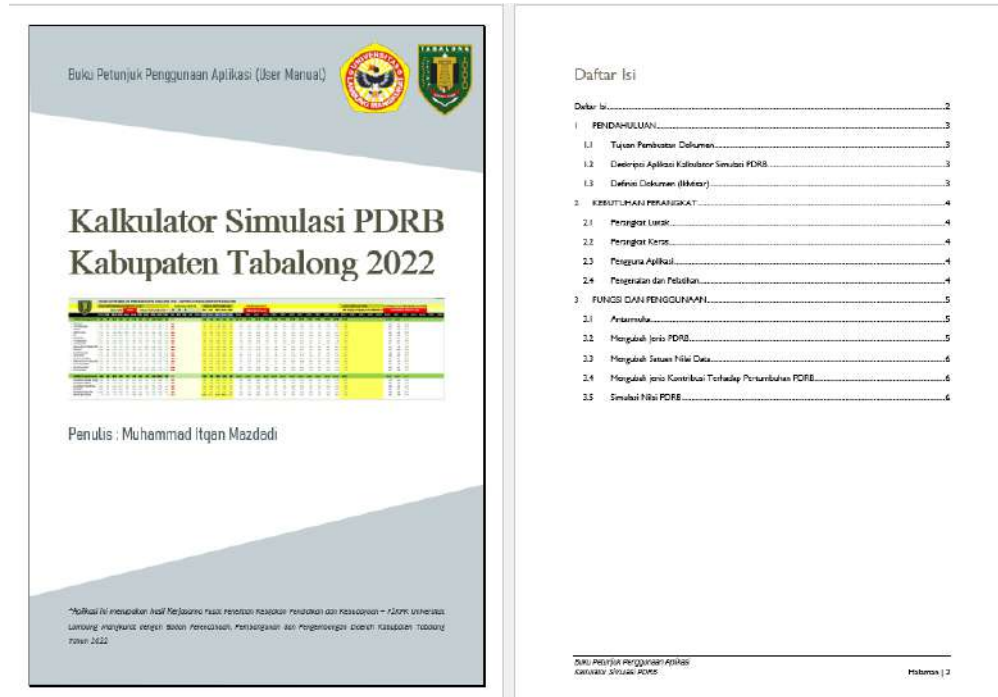
1. Kalkulator Simulasi Pertumbuhan Ekonomi
2. Kalkulator Simulasi PDRB
3. Kalkulator Analisis Ekonomi Regional
4. Kalkulator Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang (PPEJP)
5. Kalkulator Simulasi Inflasi
6. Kalkulator Simulasi Tingkat Pengangguran Terbuka
7. Kalkulator Simulasi Kemiskinan dan Ketimpangan
8. Kalkulator Simulasi Indeks Pembangunan Manusia, dan
9. Kalkulator Simulasi Aanalytical Hierarchy Process

Berikut tampilan halaman sampul dan daftar isi manual aplikasi kalkulator yang telah siap digunakan:

### 1. Manual Kalkulator Simulasi Pertumbuhan Ekonomi



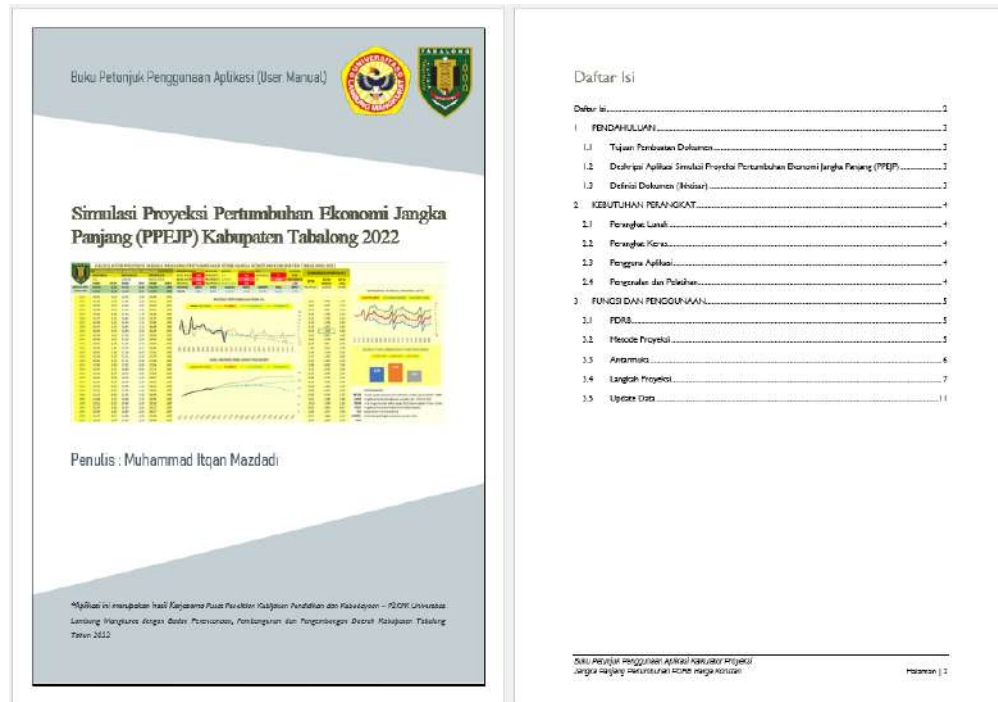
## 2. Manual Kalkulator Simulasi PDRB



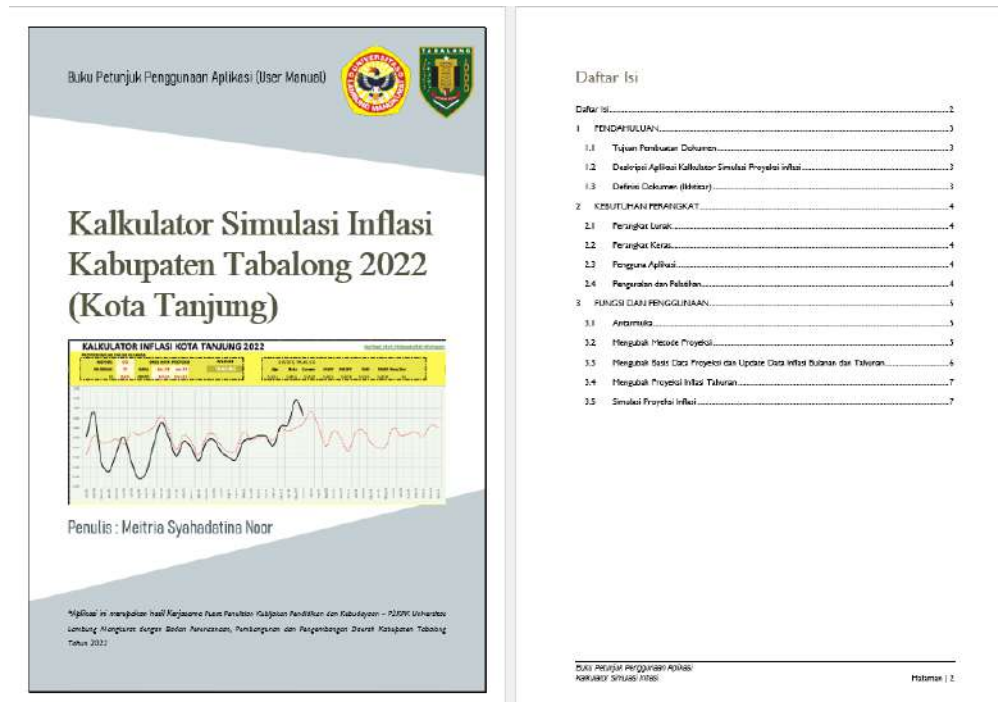
## 3. Manual Kalkulator Simulasi Analisis Ekonomi Regional

Diisi screenshot manualnya

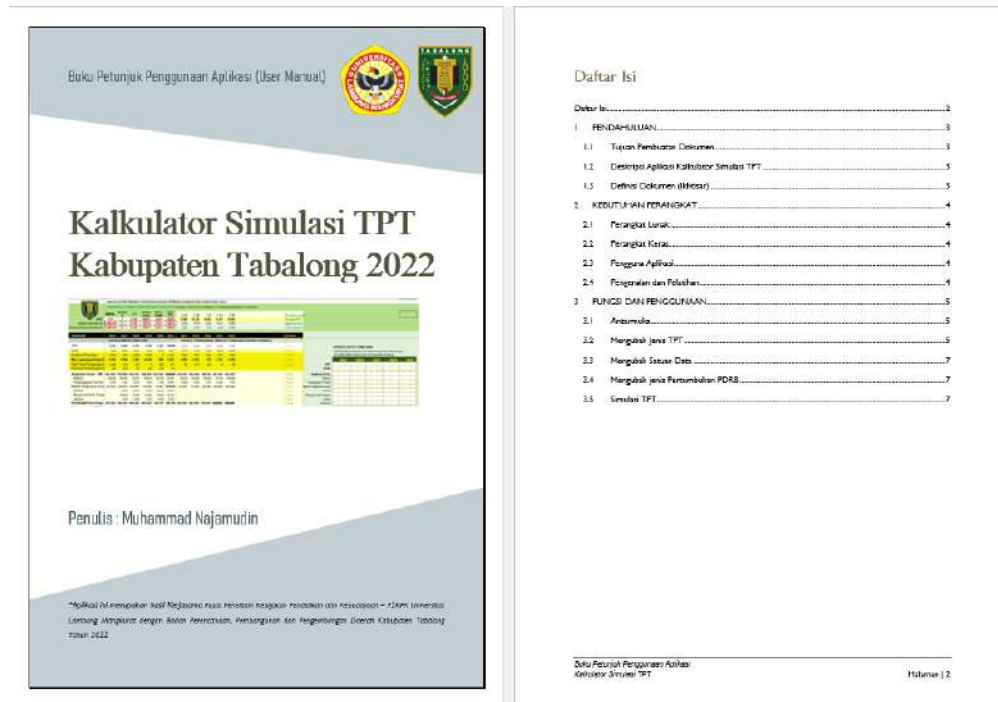
## 4. Manual Kalkulator Simulasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang (PPEJP)



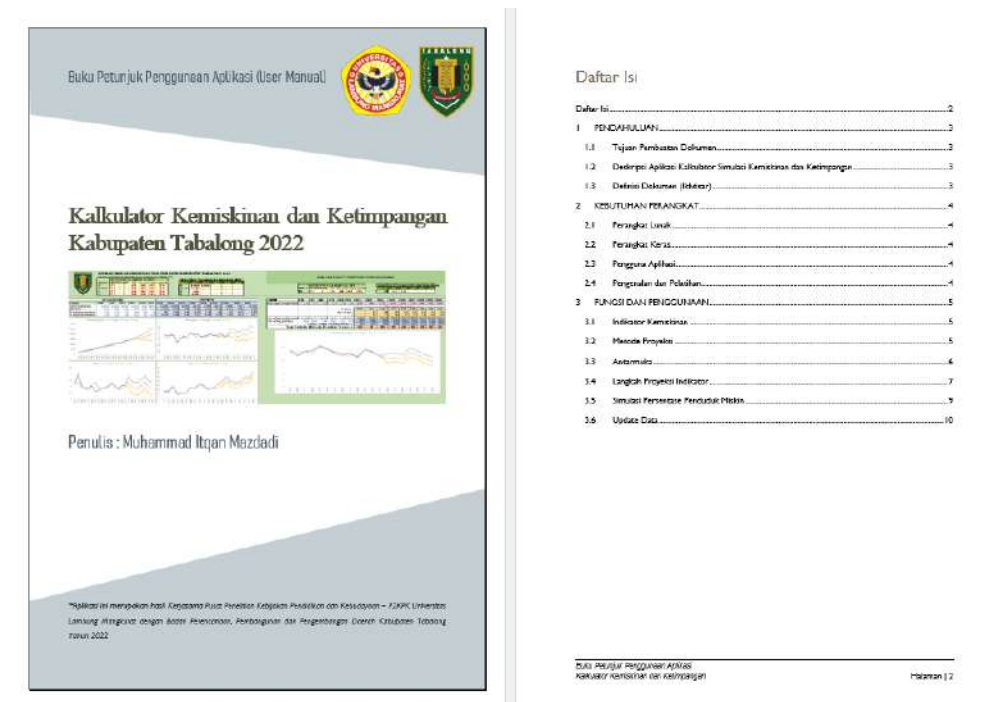
## 5. Manual Kalkulator Simulasi Inflasi



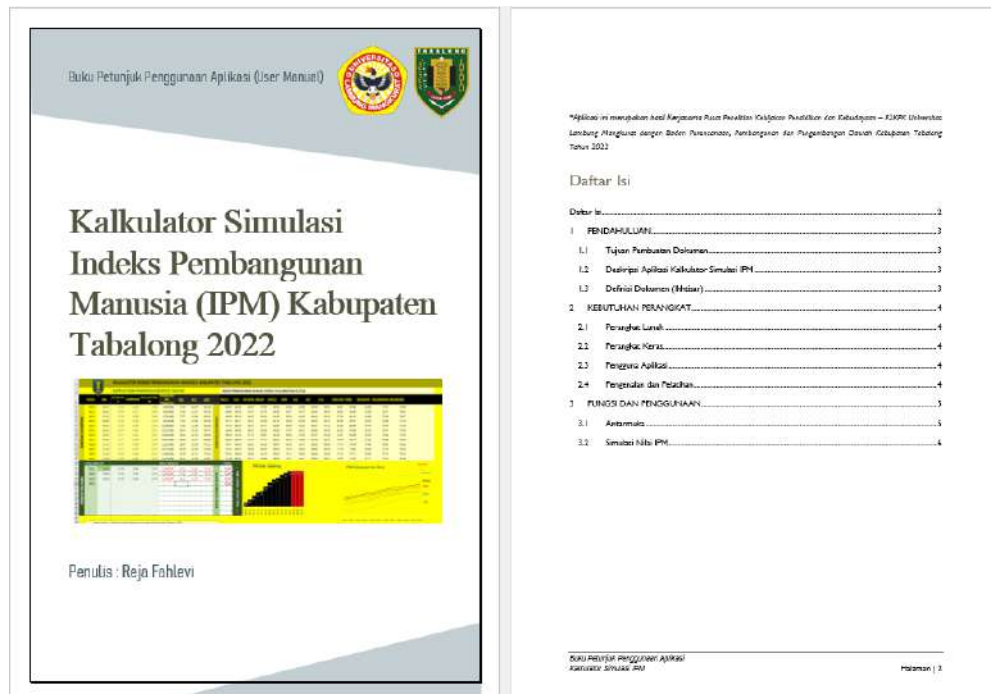
## 6. Manual Kalkulator Simulasi Tingkat Pengangguran Terbuka



## 7. Manual Kalkulator Simulasi Kemiskinan dan Ketimpangan



## 8. Manual Kalkulator Simulasi Indeks Pembangunan Manusia



## 9. Manual Kalkulator Simulasi Analytical Hierarchy Process

Diisi screenshot manualnya

### C. Demonstrasi Aplikasi kalkulator di ULM Bersama Bappedalitbang

Demonstrasi Aplikasi serta diskusi terkait aplikasi yang dibangun telah dilaksanakan pada :

Tanggal : 9 Agustus 2022

Waktu : 09.00 – 13.00 WITA

Tempat : Aula LPPM Kampus Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Indonesia.

Berikut Dokumentasi Kegiatan yang telah dilaksanakan :







Tanggal 23 Agustus 2022. Tim melaksanakan laporan antara dan demonstrasi Aplikasi Kalkulator Indikator Makro Sosial di kantor Bappedalitbang Kabupaten Tabalong, yang dimana dihadiri dari SKPD:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Sosial
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Ketenagakerjaan
5. Dinas Perdagangan
6. Dinas Koperasi/ UKM
7. Dinas Pertambangan
8. Dinas Perindustrian
9. Badan Pusat Statistik
10. Tim Pengendali Inflasi

Kegiatan dilaksanakan di Aula Bappedalitbang Kabupaten Tabalong. Pukul 09.00 s.d 14.00 Wita. Kegiatan dimulai dengan penyampaian laporan dari TIM dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dibawah ini sertakan foto kegiatan laporan antara.





## **D. POLICY BRIEF INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI**

### **1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB (PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TABALONG)**

Era bom harga batubara mengangkat perekonomian Kabupaten Tabalong pada abad ke-21 dengan rerata pertumbuhan sebesar 5,49% per tahunnya. Namun selama satu dekade kemudian, 2011-2020, harga batubara di pasar global anjlok dan Pertumbuhan Ekonomi melambat (slowdown) pada level 3,50% per tahun.

Berdasarkan basis data 2001-2021, proyeksi model linear aplikasi “Kalkulator Simulasi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang Kabupaten Tabalong 2022” menunjukkan tren perekonomian Kabupaten Tabalong akan melambat dan kemudian berkontraksi dalam satu dekade terakhir. Rerata Pertumbuhan Ekonomi dalam periode 2022-2045 sebesar 0,03% per tahun sedangkan berdasarkan kalkulasi Compound Annual Growth Rate (CAGR) mencapai 0,02%. Potensi terjadinya skenario ini harus diwaspadai dan dicegah. Bila terwujud, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) selama 25 tahun ke depan dari 2020 hanya bertambah sebesar Rp0,56 triliun sehingga di akhir periode proyeksi 2045 nilainya menjadi Rp15,04 triliun. Skenario ini dapat terjadi dengan asumsi Kabupaten Tabalong masih bergantung pada sektor primer dan tidak ada sektor sekunder dan tersier yang maju dan dominan.

Merujuk pada hasil kajian ini sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menyusun rencana dan kebijakan pembangunan jangka panjang. Orientasinya adalah menurunkan ketergantungan pada Sektor Pertambangan dan mendesain sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan sustainabel sehingga dapat maju dan dominan dalam jangka menengah dan panjang.

*Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Perekonomian Jangka Panjang, Sektor Pertambangan*

## 2. Analisis Ekonomi Regional

Analisis ekonomi wilayah sebagai salah satu instrument kebijakan yang berdasarkan pada data (evidence base policy), sektor Pertambangan dan Penggalian berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Tabalong. Sektor ini masuk pada kelompok unrenewable resources dan sangat rentan terhadap perubahan harga komoditas di pasar global sehingga sangat rentan jika tetap dipertahankan sebagai penyokong utama, apalagi jika dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, untuk itu diperlukan sektor unggulan yang bisa menggantikan posisi tersebut. Ada dua skenario yang dianalisis dalam kajian kebijakan ini, **skenario pertama** menggunakan data historis 5 tahun dari data awal tersedia periode (2010-2014), **skenario kedua** menggunakan data historis 5 tahun terakhir periode (2017-2021), **skenario ketiga** menggunakan data historis 5 tahun terakhir sebelum Pandemi C 19 periode (2015-2019). Hasil skenario pertama analisis Shift Share menunjukkan semua sektor perkembangannya positif kecuali sektor listrik dan gas periode 2010-2011 dan 2012-2013 perkembangannya negatif, analisis LQ hanya sektor sektor Pertambangan yang bisa menjadi sektor basis, dan analisis Klassen tidak ada satu sektorpun yang maju dan tumbuh pesat namun sektor Pertanian, Konstruksi, Akomodasi dan makan minum, Infokom, Real Estate, dan Jasa Perusahaan potensial berkembang. Skenario kedua analisis Shift Share menunjukkan semua sektor perkembangan positif kecuali tahun 2019-2020 hampir semua sektor tumbuh negatif, analisis LQ sektor Infokom bisa menjadi sektor basis, dan analisis Klassen hanya sektor Infokom berpotensi maju dan tumbuh pesat sedangkan sektor pertambangan maju tapi tertekan, sektor Pertanian, Industri, Listrik dan gas, Air, Konstruksi, Perdagangan, Transportasi, Akomodasi dan makan minum, Jasa keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan potensial berkembang. Skenario 3 semua sektor perkembangannya positif kecuali pertambangan periode 2016-2017 perkembangannya negatif, hanya sektor sektor Pertambangan dan Infokom yang bisa menjadi sektor basis dan sebagai sektor yang maju dan tumbuh pesat, sedangkan sektor pertambangan maju tertekan, sektor lain yang potensial berkembang adalah sektor Pertanian, Industri, Air, Konstruksi, Perdagangan, Transportasi, Akomodasi dan makan minum, Jasa Keuangan, Real Estate, dan Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Jasa lainnya.

Kata kunci: *Analisis Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi*

### **3. Tingkat Pengangguran Terbuka (LAPANGAN KERJA BARU UNTUK TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA RPJMD KABUPATEN TABALONG 2022-2024)**

Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Kabupaten Tabalong mengalami kontraksi sebesar -2,49% pada tahun 2020 dan mendorong kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,07% di 2020 menjadi 3,43% pada 2021. Proyeksi aplikasi “Kalkulator Simulasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong 2022” dengan menggunakan basis data 2012-2021, model Exponential Triple Smoothing (ETS) dan level seasonalitas 6 menunjukkan TPT dapat terjadi pada rentang 3,19-3,69% pada tahun 2022, 3,57-4,07% tahun 2023 dan 2,79-3,29% di tahun 2024.

Simulasi menghitung jumlah lapangan kerja baru untuk mencapai target TPT RPJMD Kabupaten Tabalong 3,00-4,00% diperlukan dengan menggunakan asumsi jumlah Angkatan Kerja hasil proyeksi model ETS dan Linear. Simulasi berdasarkan skenario proyeksi model ETS dengan target TPT paling optimis 3,00%, dibutuhkan penambahan lapangan kerja baru sebanyak 1.037 pada tahun 2022, 2.002 tahun 2023 dan 4.029 tahun 2024. Sedangkan jika menggunakan skenario proyeksi model Linear jumlah tambahan lapangan kerja baru yang diperlukan sekitar 2.083 pada tahun 2022 serta 1.676 untuk tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan hasil kajian ini Bappeda Litbang Kabupaten Tabalong dapat merancang kebijakan dengan target penambahan lapangan kerja baru minimal sebesar 2.000 unit per tahunnya selama 2022-2024.

Kata kunci: *Pengangguran Terbuka, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja*

### **4. Inflasi**

Kota Tanjung di Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi sampel Indeks Harga Konsumen. Inflasi tahunan di Kota Tanjung tahun 2021 sebesar 2,43 persen lebih tinggi sebesar 0,38 persen

dibandingkan dengan inflasi tahun 2020 sebesar 2,05 persen. Inflasi bulanan di Kota Tanjung relatif memiliki pola yang sama dan berulang secara musiman, dengan trend yang positif. Pola inflasi tahun 2021 di Kota Tanjung cenderung tinggi di bulan Pebruari, Juni, dan, November. Namun kondisi di bulan April, Juli, Agustus, dan September terjadi deflasi. Berdasarkan data historis inflasi di Kota Tanjung menunjukkan kondisi yang flutuatif sehingga proyeksi inflasi yang paling relevan adalah yang menggunakan exponential triple smoothing (ETS) adalah metode yang didasarkan atas tiga persamaan pemulusan, masing-masing untuk unsur stasioner, trend dan musiman, sehingga diharapkan mampu menangkap phenomena yang sifatnya musiman seperti inflasi. Hasil proyeksi inflasi dengan data dasar Januari 2018 dengan pertimbangan sejak kondisi sebelum pandemi C 19 yang relatif stabil hingga kondisi akhir di bulan Juni 2022 dengan ETS terlihat pola yang paling mirip adalah dengan musiman 13, diperoleh grafik dan besar proyeksi inflasi. Rata-rata inflasi tahun 2022 sebesar 0,39 persen, tahun 2023 0,47 persen dan tahun 2024 sebesar 0,37 persen.

Kata Kunci : *Inflasi Kabupaten Tanjung*

## **5. Kemiskinan dan Ketimpangan (TINGKAT KEMISKINAN DAN KESENJANGAN KABUPATEN TABALONG 2022-2024**

Target RPJMD Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tabalong periode 2022-2024, tahun 2022 dengan tingkat kemiskinan 5,65%, tahun 2023 tingkat kemiskinan 5,60, dan tahun 2024 tingkat kemiskinan 5,35%. Penulis menerapkan dua skenario realisasi target Tingkat kemiskinan. **Skenario pertama**, diprediksikan tingkat kemiskinan sesuai dengan target RPJMD maka tahun 2022 dengan tingkat kemiskinan 5,65%, jumlah penduduk miskin sebanyak 14.847 jiwa, tahun 2023 tingkat kemiskinan 5,60%, penduduk miskin menjadi 14.896 jiwa dan tahun 2024 tingkat kemiskinan 5,35%, penduduk miskin menjadi 14.413 jiwa

**Skenario kedua**, diprediksikan berdasarkan data historis 2011-2021 maka jumlah penduduk miskin tahun 2022 sebanyak 15.855 jiwa dengan tingkat kemiskinan 6,04%. tahun 2023 sebanyak 16.021 jiwa dengan tingkat kemiskinan 6,02%, dan tahun 2024 sebanyak 16.185 jiwa dengan tingkat kemiskinan 6,01%. Gini ratio tahun 2022 sebesar 0,303, tahun 2023 sebesar 0,301, 2024 sebesar 0,299. Berdasarkan kedua skenario tersebut upaya pengurangan kemiskinan pada proyeksi basis data historis akan lebih berat dibandingkan dengan target RPJMD ini bermakna diperlukan usaha yang besar dan sinergi antar OPD agar berhasil dan untuk itu diperlukan penyediaan lapangan pekerjaan, mempertahankan daya beli serta memperhatikan masyarakat nyaris miskin, kedalaman serta keparahan kemiskinan dengan berbagai instrument kebijakan.

Kata Kunci : *Kemiskinan, Kesenjangan, Kedalaman, Keparahan Dan Gini Ratio*

## **6. IPM Pendidikan**

Indikator pembentuk IPM untuk komponen Pendidikan adalah Rata-rata Angka harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS). Komponen lainnya adalah AHH (Angka Harapan Hidup) sebagai indeks kesehatan dan PP (Pengeluaran Perkapita) sebagai indeks kesejahteraan. IPM Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 meningkat 0,41 point mencapai angka 72,60 dibanding capaian pada tahun 2020 sebesar 72,19. Pandemi Covid-19 di awal tahun 2019, tidak memberi dampak terhadap penurunan capaian IPM Kabupaten Tabalong, justru mampu bertahan memperoleh kenaikan sebesar 0,41 point dari capaian tahun 2019 sebesar 71,78 (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021). Target capaian IPM tahun 2023 sebesar 74,33, sementara untuk tahun 2022 ditargetkan mencapai 73,60, dan realisasi pencapaiannya pada tahun 2021 sebesar 72,60 telah dapat dipenuhi. Untuk skenario pencapaian target tahun 2022 dan 2023 diperlukan beberapa langkah strategis yang fokus untuk mencapainya. Simulasi pencapaian target IPM dari komponen RLS dan



HLS dapat diskenariokan menjadi 4(empat) pilihan yakni skenario (1)jika indeks kesehatan (AHH) dan kesejahteraan (PP) konstan dengan sumberdaya dan dana diarahkan khusus untuk memacu RLS, dan sementara HLS konstan; skenario (2) jika hal yang sama (1) tetapi yang dipacu HLS, dan sementara RLS konstan; skenario (3) jika hal yang sama (1) tetapi yang dipacu RLS dan HLS dengan komposisi yang mampu menunjang capaian target IPM; dan skenario (4) jika semua komponen penentu IPM baik indeks kesehatan, kesejahteraan, maupun pendidikan secara proporsional berimbang sesuai determinan dari masing-masing.

Simulasi perhitungan RLS, HLS, AHH, dan PP yang diskenariokan menurut asumsi untuk mencapai target IPM tahun 2022 dan 2023 diperoleh hitungan (1) jika hanya RLS yang dipacu, tahun 2022 indeks RLS = 9,94, tahun 2023 indeks RLS = 10,56, tahun 2024 indeks RLS = 11,21; (2)jika hanya HLS yang dipacu, tahun 2022 indeks HLS = 13,89, tahun 2023 indeks HLS = 14,63, tahun 2024 indeks HLS = 15,41; (3)jika RLS dan HLS dipacu, tahun 2022 indeks RLS = 9,43 berkombinasi dengan indeks HLS = 13,50, tahun 2023 indeks RLS = 9,85 berkombinasi dengan indeks HLS = 13,75; dan untuk tahun 2024 indeks RLS = 10,27 berkombinasi dengan indeks HLS = 14,01; (4)jika semua komponen IPM dipacu bersama dengan komposisi yang berimbang determinannya, tahun 2022 indeks PP = 12.300.000, RLS = 9,16, HLS = 12,96, AHH = 70,95; tahun 2023 indeks PP = 12.950.000, RLS = 9,18, HLS = 12,98, AHH = 71,31; dan untuk tahun 2024 indeks PP = 13.750.000, RLS = 9,20, HLS = 13,00, dan AHH = 71,55.

Berdasarkan kajian 4 (empat) skenario ini Bappeda Litbang Kabupaten Tabalong dapat memilih alternatif kebijakan yang paling relevan dengan kondisi sumberdaya dan dana yang dimiliki untuk pencapaian target IPM tahun 2022, tahun 2023 serta proyeksi target 2024 beserta konsekuensi implikasi distribusi beban kerjanya.

Kata Kunci: *IPM Pendidikan, RLS, HLS.*

## **7. IPM Kesehatan**

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Target IPM berdasarkan RPJMD berturut-turut tahun 2022-2024 adalah 73,60, 74,33, dan 75,07. Berdasarkan rerata peningkatan AHH Kab. Tabalong tahun 2010-2021, didapatkan proyeksi AHH untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 adalah 70,70, 70,83, dan 70,96. Sedangkan target AHH berdasarkan RPJMD Kab. Tabalong untuk tahun 2022-2024 adalah 70,47, 70,60, dan 70,73. Simulasi kalkulator IPM yang disesuaikan dengan target RPJMD menunjukkan AHH yang lebih tinggi yang harus dicapai dibandingkan dengan data proyeksi/target RPJMD, atau menyesuaikan dengan target RPJMD tapi indeks Pendidikan dan indeks kesejahteraan harus meningkat pesat. Perlu upaya yang lebih besar untuk meningkatkan AHH. Upaya untuk meningkatkan AHH adalah dengan memperhatikan fasilitas Kesehatan, SDM Kesehatan, program Kesehatan (program ibu dan anak, remaja, SPM, dan stunting), dan penganggaran untuk bidang Kesehatan.

Kata Kunci: *AHH, Indeks Kesehatan, Program Kesehatan*

## **8. IPM Kesejahteraan**

Target Indeks Pembangunan Manusia indikator Kesejahteraan tidak ditetapkan secara implisit dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024, hanya pada komponen pendidikan dan Kesehatan saja, sedangkan komponen kesejahteraan tidak ditetapkan secara eksplisit, ada 5 skenario yang ditawarkan dalam policy brief ini yang terkait dengan Pencapaian target IPM dari komponen Kesejahteraan. **Skenario 1** semua komponen pembentuk IPM disamakan dengan target dalam RPJMD Perubahan, dan hasilnya Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (PPPk) lebih rendah dari yang sudah tercapai di tahun 2020 dan 2021, namun target pada komponen pendidikan cukup berat untuk direalisasi. **Skenario 2** beban

komponen PPPk sudah mulai terasa berat, ketika semua alokasi sumber daya dioptimalkan pada komponen PPPk sedangkan komponen lainnya tetap sama dengan capaian tahun 2021, maka kenaikan PPPk pada tahun 2022 harus sebesar Rp.1.250.000,-/tahun. **Skenario 3** beban komponen PPPk saat komponen RLS disesuaikan dengan kondisi riil dan komponen lainnya tetap sama dengan capaian tahun 2021, maka kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar Rp. 1.220.000,-/tahun. **Skenario 4** beban komponen PPPk saat komponen RLS dan HLS disesuaikan dengan kondisi riil dan komponen lainnya tetap sama dengan capaian tahun 2021, maka kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar Rp. 1.170.000,-/tahun. **Skenario 5** alokasi sumber daya pada semua komponen PPPk, RLS, HLS, dan AHH, maka kenaikan PPPk tahun 2022 sebesar Rp.850.000,-/tahun, hal ini menunjukkan bahwa dengan mengubah komposisi capaian indikator pembentuk IPM beban setiap OPD akan lebih ringan mengingat semua OPD bergerak secara bersama-sama untuk mewujudkan pencapaian IPM tersebut. Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengeluaran perkapita disesuaikan adalah Pemerintah Kabupaten Tabalong membuat program dan kebijakan seperti membuka lapangan usaha baru, memperbesar usaha yang sudah ada dengan memudahkan akses pendanaan, membantu masyarakat menciptakan wirausaha baru, membantu usaha yang terdampak pandemi yang sudah bangkrut maupun masih bertahan, melanjutkan program pemulihan ekonomi melalui BLT, menjamin lancarnya distribusi barang, mempertahankan daya beli masyarakat ditengah ancaman inflasi global.

Kata Kunci : *IPM Kesejahteraan, Pengeluaran Perkapita Disesuaikan*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian laporan akhir penyusunan indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2022 telah di sampaikan ke dalam bentuk laporan. Laporan akhir terdiri dari file aplikasi simulasi kalkulator indikator makro sosial, manual aplikasi, buku data, dan *policy brief* meliputi; Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB, Analisis Ekonomi Regional, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, Kemiskinan dan Ketimpangan, IPM Pendidikan, IPM Kesehatan, IPM Kesejahteraan

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiana, I. W. (2016). Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan Di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. *Unud.Ac.Id*.
- Nugroho, Riant, & Wriahatnolo, R. R. (2011). Manajemen Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT. ELIX MEDIA KOMPUTINDO.
- Putra, W. (2018). Perekonomian Indonesia : Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia (1 (satu)). Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sjafrizal. (2012). Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soepono, P. (1993). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 12 No. 3 Tahun 1997, 8, 18. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jib/article/view/40049>
- Sukidjo ,(2005),Peran Kewirausahaan dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Jurnal Ekonomia ,Volume 1.No 1 Agustus 2005.
- Adaramola, A. O., & Dada, O. (2020). Impact of inflation on economic growth: evidence from Nigeria. *Investment Management and Financial Innovations*. *Investment Management and Financial Innovations*, 17(2), 1–13. [https://doi.org/10.21511/imfi.17\(2\).2020.01](https://doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.01)
- Alrakhman, D., Susetyo, D., Taufiq, T., & Azwardi, A. (2022). Effect of Economic Growth on Unemployment Rate in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(2), 10132–10141. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V5I2.4811>
- Amiri, H., Samadian, F., Yahoo, M., & Jamali, S. J. (2019). Natural resource abundance, institutional quality and manufacturing development: Evidence from resource-rich countries. *Resources Policy*, 62, 550–560. <https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2018.11.002>
- Armantier, O., Koşar, G., Pomerantz, R., Skandalis, D., Smith, K., Topa, G., & van

- der Klaauw, W. (2021). How economic crises affect inflation beliefs: Evidence from the Covid-19 pandemic. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 189, 443–469. <https://doi.org/10.1016/J.JEBO.2021.04.036>
- Bhat, J. A., ganaie, A. A., & Sharma, N. K. (2018). Macroeconomic Response to Oil and Food Price Shocks: A Structural VAR Approach to the Indian Economy. <https://doi.org/10.1080/10168737.2018.1446038>, 32(1), 66–90. <https://doi.org/10.1080/10168737.2018.1446038>
- Dunn Jr., R. M., & Mutti, J. H. (2004). *International Economics (Sixth Edit)*. Routledge.
- Frankel, J. A. (2012). The Natural Resource Curse: A Survey of Diagnoses and Some Prescriptions. In Harvard Kennedy School. <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:8694932%0Athis>
- Ghosh, A., & Phillips, S. (1998). Warning: Inflation May Be Harmful to Your Growth. *Bruno and Easterly*, 45(4).
- Hayat, A., & Tahir, M. (2021). Risk and Financial Management Natural Resources Volatility and Economic Growth: Evidence from the Resource-Rich Region. <https://doi.org/10.3390/jrfm14020084>
- Jacks, D. S., O’rourke, K. H., & Williamson, J. G. (2011). Commodity Price Volatility and World Market Integration Since 1700. *Review of Economics & Statistic*, 93(3), 800–813. [https://doi-org.ezproxye.bham.ac.uk/10.1162/REST\\_a\\_00091](https://doi-org.ezproxye.bham.ac.uk/10.1162/REST_a_00091)
- Louail, B., & Benarous, D. (2021). Relationship between Economic Growth and Unemployment Rates in the Algerian Economy: Application of Okun’s Law during 1991–2019. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 23. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1007173>
- Makridakis, S., Wheelwright, S. C., & McGee, V. E. (n.d.). *Metode dan Aplikasi Peramalan, Jilid 1* (H. Suminto (ed.); Revisi). Binarupa Aksara.
- Mankiw, G. N. (2005). *Macroeconomics: Seventh Edition*. Worth Publishers.

- Öner, C. (2020). Inflation: Prices on the Rise. *Finance and Development*.  
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/inflat.htm>
- Porter, M. E. (2003). The Economic Performance of Regions. *Regional Studies*,  
 37(6–7), 545–546. <https://doi.org/10.1080/0034340032000108688>
- Saleh, S., Titis, D., Wardani, K., & Ivantri, M. A. (2019). RAMADHAN, EID UL  
 FITR, AND INFLATION: LESSON FROM INDONESIAN SUBNATIONAL  
 DATA. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 20(2), 135–150.  
<https://doi.org/10.18196/JESP.20.2.5020>
- Segii, P. (2009). Inflation and Economic Growth: The Non-Linear Relationship.  
 Evidence from CIS Countries [Kyiv School of Economics ].  
<https://kse.ua/wp-content/uploads/2019/03/Pypko.pdf>
- Sun, Z. Q., & Wang, Q. (2021). The asymmetric effect of natural resource abundance  
 on economic growth and environmental pollution: Evidence from resource-rich  
 economy. *Resources Policy*, 72, 102085.  
<https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2021.102085>
- Taghizadeh-Hesary, F., Rasoulinezhad, E., & Yoshino, N. (2019). Energy and Food  
 Security: Linkages through Price Volatility. *Energy Policy*, 128, 796–806.  
<https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2018.12.043>
- Zallé, O. (2019). Natural resources and economic growth in Africa: The role of  
 institutional quality and human capital. *Resources Policy*, 62, 616–624.  
<https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2018.11.009>